

**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KALURAHAN KEPUHARJO,
KAPANEWON CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

**AINNA PARADIVA GANDASARI
21520082**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KALURAHAN KEPUHARJO,
KAPANEWON CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

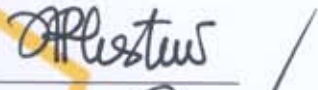


Hari : Senin

Tanggal : 21 April 2025

Jam : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P.</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
2. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I	
3. <u>Minardi, S.IP., MSc</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainna Paradiva Gandasari
Nim : 21520082
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Menunjang Kesejahteraan Petani Kopi Di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman." adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ainna Paradiva Gandasari

NIM: 21520082

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ainna Paradiva Gandasari
NIM : 21520082
Telp : 082136926065
Email : ainnaparadiva8@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Menunjang Kesejahteraan Petani Kopi Di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman".

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 18 April 2025



Ainna Paradiva Gandasari
21520082

MOTTO

Fortis Fortuna Adiuvat

“Keberuntungan berpihak kepada yang berani”.

“Dan di hariku yang paling gelap semoga aku akan mengingat bahwa ini sementara dan akan segera pergi dengan cepat”.

(The Adams-Timur)

“Apa yang tak bisa kau raih walau kau tlah berupaya, itu hanya tanda kau tak membutuhkannya. Apa yang tak bisa kau miliki meski kau tlah temui, itu hanya tanda kau lebih baik tanpanya”.

(Rumah Sakit-Apa Yang Tak Bisa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, skripsi ini sebagai wujud nyata dari proses panjang, perjuangan, serta doa yang tak henti-hentinya. Mereka yang selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan penulis dalam menempuh setiap langkah dalam perjalanan akademik ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Musari dan Ibu Atmiyatun, dengan segenap cinta dan rasa hormat, saya ucapkan banyak terima kasih karena selalu mendukung dan tidak pernah putus mendoakan saya hingga saat ini. Sehingga saya mampu menyelesaikan tanggung jawab saya untuk mendapat gelar sarjana. Terima kasih telah menjadi tempat saya pulang, menjadi semangat dalam setiap langkah saya, dan menjadi alasan terbesar untuk terus berjuang. Tanpa restu dan dukungan kalian, saya bukanlah siapa-siapa.
2. Adik saya tersayang Mahadewi Sukma Ratu Kinasih, yang selalu menjadi sumber motivasi dan semangat dalam setiap langkah saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, dengan dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada saya. Semoga kamu terus bersinar dan meraih cita-citamu, seperti yang selalu kita impikan bersama.
3. Kakek dan Nenek saya, Bapak Tumarno dan Ibu Rahayu yang telah merawat dan mengasuh saya dari kecil hingga saat ini, terima kasih untuk dukungan, doa dan cinta kasihnya yang tidak pernah putus untuk saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Menunjang Kesejahteraan Petani Kopi di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman". Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Penulis menyadari bahwa proposal ini dapat di selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan yang sebesar-besarnya kepada:

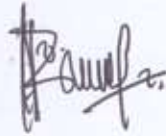
1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
4. Utami Sulistiana, S.P., M.P, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing saya meberikan arahan dan berbagi pengetahuan serta gagasan yang mendukung saya untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Minardi, S.IP., M.Sc selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Keluarga Besar STPMD "APMD" Yogyakarta, yang telah membekali ilmu, memberikan pengetahuan serta pengalaman sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo beserta masyarakat yang terlibat telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta dukungan dan kerjasamanya dengan penulis dalam proses penelitian ini.
9. Sahabat saya terkasih Ayu Putri dan Nanda Liana. Terima kasih telah kebersamaian saya dalam perjalanan ini dengan penuh suka cita, selalu menjadi tempat pulang saya ketika dunia tidak baik-baik saja. Cinta kasih dan dukungan kalian sangat berharga untuk saya bisa bertahan sampai saat ini.
10. Untuk teman-teman saya tercinta yang saya temui di rantauan, Diva, Lala, Nia, Lila, Lutfi, Adil, Bimo, Evendi, Aji, Rivaldi. Terima kasih telah menjadi teman rantau yang bukan sekedar teman bagi saya, tapi sudah seperti saudara. Yang kebersamaian penulis berjalan untuk sampai pada tahap ini, untuk terus berjuang bersama-sama menyelesaikan tanggung jawab yang sudah kita mulai ini. Serta menjadi teman ngopi saat kesepian dan berbagi keluh kesah sampai pagi hari.
11. Seluruh teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan ini.
12. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang selalu menjadi supporter paling depan bagi saya. Menjadi motivasi bagi saya untuk terus maju dan membuktikan bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan terus bertumbuh serta menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terima kasih, telah menjadi tempat pulang paling nyaman dan selalu menemani saya selama berada di masa-masa sulit dan menguatkan saya untuk bertahan hingga saat ini. Kehadiran mu telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus menyakitkan dari proses pendewasaan saya. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
13. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih Ainna Paradiva Gandasari yang sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar

keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu kuat, kamu hebat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat konstruktif, yang tentunya akan menjadi pelajaran berharga. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 April 2025



Ainna Paradiva Gandasari

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Akademik	6
2. Manfaat Teoritis	7
3. Manfaat Praktis.....	7
F. <i>Literatur Review</i>	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Konsep Fasilitasi	14
2. Pemerintah Desa	16
3. Governing	17
4. Pemberdayaan Masyarakat	19

5. Kesejahteraan.....	21
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Unit Analisis	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II PROFIL KALURAHAN KEPUHARJO DAN PETANI KOPI	29
A. Sejarah Kalurahan Kepuharjo	29
B. Struktur Pemerintahan.....	30
C. Visi dan Misi Kalurahan Kepuharjo	31
1. Visi	31
2. Misi.....	32
D. Kondisi Geografis.....	33
E. Kondisi Demografis.....	35
1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	35
2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan.....	36
3. Jumlah Penduduk menurut Usia	37
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	38
5. Jumlah Penduduk menurut Agama.....	38
F. Kondisi Ekonomi	39
G. Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo	39
H. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	41
I. Potensi Ekonomi	42
J. Gambaran Umum Potensi Kopi dan Kelompok Tani.....	44
BAB III FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA	
PEMBERDAYAAN PETANI KOPI.....	48
A. Menciptakan Interaksi Yang Produktif	48
B. Memungkinkan Partisipasi Aktif.....	54
C. Meningkatkan Kapasitas Individu Untuk Mencapai Tujuan Bersama.....	61
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan	70

1. Faktor Pendukung.....	70
2. Faktor Penghambat.....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Informan.....	24
Tabel 2. 1	Keterangan Struktur Pemerintahan	31
Tabel 2. 2	Batas Wilayah Kalurahan Kepuharjo	33
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	38
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	38
Tabel 2. 6	Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo per Padukuhan	39
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan	41
Tabel 2. 8	Daftar Kelompok Tani di Kalurahan Kepuharjo.....	46
Tabel 3. 1	Program Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023-2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman	30
Gambar 2. 2	Peta Wilayah Kalurahan Kepuharjo	34
Gambar 2. 3	Diagram Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	35
Gambar 2. 4	Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian	36
Gambar 2. 5	Diagram Jumlah Penduduk menurut Usia	37
Gambar 2. 6	Lapangan Golf Merapi	42
Gambar 2. 7	Kebun Talas	42
Gambar 2. 8	Kebun Cabe Rawit	43
Gambar 2. 9	Kebun Sengon	43
Gambar 2. 10	Lava Tour Merapi	44
Gambar 2. 11	Stonehenge	44
Gambar 2. 12	Kopi Merapi	45
 Gambar 3. 1	 Surat Keputusan (SK) Gapoktan	 50
Gambar 3. 2	Kegiatan (Musrenbang) Musyawarah Rencana Pembangunan	52
Gambar 3. 3	Rincian Bantuan Dana Provinsi	59
Gambar 3. 4	Pelatihan Pembuatan Pupuk Kandang	66
Gambar 3. 5	Dusun Petung	79

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi sektor pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kalurahan Kepuharjo, yang memiliki potensi besar dalam budidaya kopi, belum sepenuhnya mengembangkan potensi tersebut karena lebih terfokus pada pembangunan sektor pariwisata pasca-erupsi Gunung Merapi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya fasilitasi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode dengan pendekatan eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami peran, tantangan, dan bentuk fasilitasi Pemerintah terhadap petani kopi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kepuharjo telah melakukan beberapa bentuk fasilitasi, seperti pemberdayaan melalui pelatihan, penyediaan bantuan alat pertanian, serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Namun, keterbatasan dana, koordinasi, dan perhatian yang lebih besar terhadap sektor lain menjadi kendala dalam proses fasilitasi. Kesimpulannya, peran Pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan petani kopi, dan perlu penguatan dari segi kebijakan, anggaran, serta komitmen agar pembangunan sektor pertanian di desa dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: fasilitasi, pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai bentuk sehingga perlu mendapatkan perlindungan serta diberdayakan untuk lebih maju, mandiri dan demokratis. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Penekanan pada peran aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan desa ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Desa sebelumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk menjalankan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pembinaan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan warga desa.

Desa pada dasarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Lebih dari itu, tata kelola yang baik

diharapkan dapat menciptakan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi desa, khususnya sebagai sumber pendapatan yang berkontribusi bagi kesejahteraan baik pemerintah desa maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun, meskipun potensi sumber daya alam yang melimpah ada, pemanfaatannya belum optimal, sehingga menjadi tantangan tersendiri baik bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat.

Pemerintah, sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan negara, memegang peranan penting dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, hingga sektor-sektor lainnya. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator pembangunan yang mendorong kemajuan dan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat menjadi indikator tingkat kemajuan dan perkembangan suatu wilayah.

Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengembangkan potensi sektor pertanian di wilayahnya masih belum berjalan secara optimal. Terdapat berbagai kendala dan tantangan yang menghambat upaya peningkatan potensi pertanian desa. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta belum adanya kebijakan secara khusus yang mengatur.

Tentu saja Pemerintah Desa menginginkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi warganya dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia di masyarakat. Sumber penghasilan yang diperoleh baik dari pariwisata maupun sektor penunjang lainnya seperti pertanian dan peternakan yang sudah ada untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan nilai ekonomi.

Kalurahan Kepuharjo, yang terletak di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 600-1200 meter di atas permukaan laut, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.474 jiwa, masyarakat di kalurahan ini menjalani beragam mata pencaharian yang berbeda-beda. Dari total tersebut, terdapat 1.108 penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun palawija termasuk kopi, yang merupakan komoditas unggulan. Pada tahun 2010 Kalurahan Kepuharjo terdampak erupsi Gunung Merapi, dengan terjadinya erupsi tersebut terjadi perubahan keadaan yang tadinya mayoritas masyarakat petani dan peternak sapi kini beralih menjadi pelaku wisata. Sehingga arah pembangunan dan pengembangan wilayah mengalami pergeseran yang signifikan. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo secara strategis memfokuskan pengembangan wilayah pada sektor pariwisata sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan.

Sektor pariwisata, khususnya wisata berbasis bencana alam seperti lava tour dan wisata edukasi kebencanaan, berkembang pesat pasca-erupsi. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo melihat peluang besar dari sektor ini karena mampu menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Hal ini menyebabkan

sektor-sektor potensial lainnya seperti pertanian, menjadi kurang mendapatkan perhatian yang seimbang dari Pemerintah Desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo mulai mengalihkan sebagian perhatian pada sektor pertanian, salah satunya pada komoditas kopi yang ditanam oleh masyarakat setempat. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berpotensi untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Produksi kopi di daerah Kepuharjo juga menunjukkan angka yang signifikan, pada tahun 2022, produksi kopi robusta mencapai 1.531,23 kuintal dan kopi arabika mencapai 299,97 kuintal.

Namun meskipun demikian, kebijakan secara tertulis yang ditujukan kepada petani kopi belum ada, hanya saja pemerintah memberikan dorongan secara lisan serta terdapat upaya fasilitasi dan pemberdayaan dari pemerintah desa. Tidak adanya kebijakan secara tertulis terhadap petani kopi yang menyebutkan bahwa petani kopi dibantu secara khusus menyebabkan tingkat partisipasi petani kopi dalam program-program yang ditawarkan masih tergolong rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi tersebut adalah kenyataan bahwa sebagian petani kopi juga bekerja di sektor pariwisata, baik sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, maupun pelaku usaha kuliner.

Kondisi ini mencerminkan adanya dualitas pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat, khususnya petani kopi, yang berdampak pada komitmen dan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan yang difokuskan pada sektor

pertanian. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam menjalankan program-program fasilitasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi secara berkelanjutan.

Dalam konsep *governing* Pemerintah Kalurahan Kepuharjo menjalankan fungsi pengelolaan pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi di wilayahnya. Dalam hal ini, *governing* mencakup peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator, dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai program yang mendukung pengembangan sektor pertanian kopi.

Sebagai bentuk konkret dari praktik *governing*, pemerintah desa seharusnya melakukan berbagai upaya fasilitasi terhadap petani kopi seperti, pendanaan bagi petani kopi, mengupayakan pengadaan bibit serta memberikan pelatihan kepada kelompok petani kopi dengan bekerjasama dengan pihak terkait. Hal tersebut menjadikan sorotan bagi peneliti sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan upaya fasilitasi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana upaya fasilitasi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo?”

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini melihat pemerintah desa dalam upaya fasilitasi dilihat dari aspek:

1. Menciptakan interaksi yang produktif
2. Memungkinkan partisipasi aktif
3. Meningkatkan kapasitas individu untuk mencapai tujuan bersama
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauhmana pemerintah desa memberikan ruang diskusi kepada petani
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program yang dijalankan dilihat dari upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
3. Kewenangan desa dalam meningkatkan kapasitas petani.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi bagi peneliti di masa depan terutama dalam bidang

pemberdayaan dengan konsep fasilitasi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap studi literatur.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada pengembangan konsep pemberdayaan berbasis kelompok dan pengelolaan sumber daya alam pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan dengan menggunakan perspektif *governing* sebagai pisau analisis penelitian ini.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan bagi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam fasilitasi untuk menunjang kesejahteraan petani kopi dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan.

F. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Galuh Diwangga (2021), yang berjudul “Pengembangan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebut jika pengembangan potensi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya program pemberdayaan masyarakat desa terutama dalam meningkatkan kapasitas terhadap masyarakat dan kurangnya perencanaan

yang matang terkait dengan penyediaan sarana prasarana serta kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang menghambat dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat sekitar desa. Tidak hanya itu namun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis baru sebatas bimbingan secara umum saja belum termasuk ke dalam teknis pelaksanaannya. Pemerintah desa kurang transparan dan terkesan tertutup sehingga belum mampu menampung aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam musyawarah membuat interaksi dan komunikasi sulit terjalin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Br Tarigan, Walid Musthafa Sembiring dan Nina Angelia (2024), yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan, Volume 3 Nomor 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa belum cukup baik dalam meningkatkan potensi dari pertanian desa, Peran Pemerintah Desa belum cukup baik dalam mengatasi faktor penghambat dari potensi pertanian desa dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak adanya fasilitas dari pemerintah desa dalam meningkatkan potensi pertanian desa. Beberapa program pemerintah yang dibuat untuk meningkatkan potensi pertanian belum

berjalan sempurna. Seharusnya pemerintah juga harus mengedepankan dan melibatkan banyak pihak, seperti dinas pertanian dalam meningkatkan potensi dari pertanian desa mampang dengan memberikan sosialisasi bersama dinas pertanian dapat memberikan masyarakat wawasan dan pengetahuan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Nippi dan Andi Pananrangi M (2020), yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (studi kasus di Desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyebut jika Pemerintah Desa Siawung telah menjalankan strategi yang cukup baik untuk memberdayakan kelompok tani namun strategi tersebut belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan pengembangan kelompok tani karena terkendala oleh anggaran dan sarana prasarana pendukung. Sehingga perlu diadakan evaluasi strategi untuk program yang dijalankan seperti pengadaan infrastruktur pertanian, serta perlunya koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait.
4. (Akbar, Noer, & Hudalloh, 2023) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Raziqi Jihad Akbar Dkk (2023), yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dalam Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 3 Nomor 1. Hasil penelitian menyebut Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Dengan memfasilitasi para kelompok tani dalam penyaluran bantuan subsidi pupuk, subsidi bibit, bahkan subsidi alat pertanian dari dinas pertanian setempat. Selain itu juga pemerintah memberikan dana operasional kelompok tani sebesar Rp.900.000 per tahun yang mana dana tersebut digunakan untuk segala urusan yang ada dalam kelompok tani, seperti rapat-rapat dan digunakan untuk dana usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki anggaran sendiri yang sudah ditetapkan pertahunnya untuk keperluan kelompok tani.

5. Penelitian yang dilakukan oleh La Senu Dkk (2022), yang berjudul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat”. Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Nomor 2. Hasil penelitian menyebut bahwa masih terjadi keterbatasan SDM yang dapat diatasi melalui pelatihan baik bagi perangkat pemerintah desa maupun masyarakat. Keberhasilan seorang Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang memadai. Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Batubanawa dalam menjalankan pemerintahan desa berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas-tugas yang diemban oleh Kepala Desa Batubanawa mencakup berbagai aspek penting, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, pembinaan

masyarakat desa untuk mendorong partisipasi aktif, serta pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kelompok.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kasihan hati Kasmita dkk (2021), yang berjudul “Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh”. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Hasil penelitian menyebut bahwa pemberdayaan petani KOPI di Kabupaten Bener Meriah melibatkan pembinaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap lingkungan perkebunan dan peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan lahan. Dinas Pertanian berperan dalam mengembangkan usaha yang sudah ada melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pembentukan kelompok usaha pengolahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta keberlanjutan usaha pertanian kopi.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Malasari, dkk (2017), yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Upaya Meningkatkan Kuantitas Komoditas Kopi Gunung Kelir”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapoktan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan fasilitasi berhasil diterapkan oleh petani dalam

mempertahankan produktivitas komoditas kopi yang meningkat dari total hasil sebelumnya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Yagus Triana H.S. (2024), yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 11 Nomor 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum berperan secara optimal dalam pengembangan kelompok tani. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa sebagai regulator berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat melalui peraturan dan mekanisme yang terkait dengan pengembangan kelompok tani, belum dilakukan secara optimal. Demikian pula regulasi yang mengatur pengalokasian anggaran yang diberikan kepada kelompok tani secara rutin belum ditunjang dengan dukungan anggaran yang memadai dalam membantu permasalahan permodalan dan pengembangan sarana atau prasarana kelompok tani. Selain itu, Pemerintah desa belum secara optimal berperan sebagai fasilitator, terutama dalam penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya, dengan demikian sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, pemerintah desa belum mampu memfasilitasi masyarakat petani secara efektif.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani Sinaga dkk (2024), yang berjudul “Analisis Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi dalam Peningkatan Hasil

Produksi Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi”. *Journal of Social Science and Digital Marketing*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di 5 desa yang berada di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ada dua jenis yaitu kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan kepada petani kopi. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan jika besar kecilnya luas lahan akan mempengaruhi produksi kopi.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Apri Utami dan Nurul Dwi Novikarumsari (2022), yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombongsari, Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian*, Vol. 3(1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menyebut bahwa minimnya pengetahuan para petani anggota dalam hal pemeliharaan kopi pasca panen, baik terkait pengolahan maupun akses pemasaran, serta kurangnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan kelompok tani memerlukan pendampingan dalam pengolahan serta akses ke pemasaran. Selain itu, pemberdayaan yang berbasis kelompok melibatkan berbagai peran dari pemangku kepentingan.

Hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian

sebelumnya. Salah satunya terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif. Metode ini melibatkan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan data. Dan persamaan topik yaitu sama-sama mengangkat topik terkait peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kepada kelompok tani. Akan tetapi, yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus riset ini yang lebih banyak berbicara mengenai fasilitasi dan peran pemerintah desa sebagai fasilitator terhadap pemberdayaan yang dilakukan dipandu menggunakan konsep fasilitasi. Selain itu, riset ini juga dilihat menggunakan perspektif *governing* yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat dan menjawab persoalan yang terjadi terkait dengan fasilitasi pemerintah desa dalam menunjang kesejahteraan petani kopi, sehingga hasil penelitian ini lebih akurat dan holistik.

G. Kerangka Konseptual

1. Konsep Fasilitasi

Menurut Ansell (2022) dalam (Pratama & dkk, 2023), Fasilitasi adalah proses yang signifikan dalam pembangunan, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau kelompok. Proses ini membantu menciptakan interaksi yang produktif, memungkinkan partisipasi aktif, dan meningkatkan kapasitas individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut (Hunter et al., 1993) dalam (Achmad & Wildan, 2018) kata "fasilitasi" berasal dari istilah "*facile*" dalam bahasa Prancis dan "*facilis*" dalam bahasa Latin, yang berarti memudahkan. Secara umum, fasilitasi

dipahami sebagai tindakan untuk mengatasi kesulitan atau hambatan, menyederhanakan sesuatu, mengurangi beban kerja, serta memberikan bantuan. Fasilitasi lebih menekankan pada proses cara sesuatu dilakukan daripada konten atau apa yang dilakukan. Seorang fasilitator berfungsi sebagai pemandu proses, yaitu individu yang membantu mempermudah atau meningkatkan efektivitas pelaksanaan suatu proses.

Fasilitasi dan fasilitator memiliki dimensi yang sangat luas. Fasilitasi berasal dari kata "*facilis*" dalam bahasa Prancis yang berarti "mempermudah", sehingga fasilitator berperan sebagai pihak yang memudahkan. Sementara itu, "fasilitas" mencakup semua hal yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, baik berupa barang maupun uang, Panggabean (1999) dalam (Achmad & Wildan, 2018).

Menurut (Hidayati, 2021), fasilitasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama melalui penyediaan dukungan serta pemanfaatan sumber daya yang dibutuhkan. Fasilitasi memainkan peran penting dalam memperlancar komunikasi dan memperkuat kerja sama kelompok, sehingga memungkinkan setiap individu untuk terlibat. Seorang fasilitator bisa mengatur pertemuan, menyusun agenda, atau memfasilitasi diskusi agar semua aspirasi terdengar. Fasilitasi tidak hanya menjamin keberlangsungan proses, tetapi juga memastikan bahwa setiap perspektif dalam kelompok dihargai sebagai bagian dari pengambilan keputusan bersama.

Menurut (Sukoco & Warsono, 2024) Fasilitasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, dengan pendampingan dari seorang fasilitator. Dalam konteks pemberdayaan, fasilitasi berperan penting sebagai media yang menjembatani masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi aspek krusial dalam proses ini, karena partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan. Oleh karena itu, peran fasilitator tidak hanya terbatas pada pendampingan teknis, tetapi juga mencakup upaya dalam membangkitkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui berbagai program yang telah dirancang.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa, sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal, dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola masyarakatnya secara mandiri. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara optimal dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warga menuju kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, keberadaan pemerintahan sangat penting untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan hakikat yang bersifat memaksa. Dengan adanya pemerintahan, pengawasan serta pengelolaan wilayah beserta batas-batasnya dapat dilakukan secara efektif dan terorganisasi dengan baik (Sugiman, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ahoinnai & dkk, 2024).

Menurut Marzuki (2017) dalam (Usman & dkk, 2023) salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan perangkatnya adalah memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, aparatur pemerintah di tingkat daerah menjadi pilihan yang ideal untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah mereka.

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting. Pemberdayaan merupakan sebuah proses bertahap yang berfokus pada pengembangan, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Kepala desa menjalankan hak dan wewenangnya dalam upaya memberdayakan masyarakatnya (Sugiman, 2018).

3. Governing

Dalam jurnal Ilmu Pemerintahan yang dikemukakan oleh (Sutoro, 2021) *Governing* diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata

yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus.

Governing memiliki padanan kata yang banyak sehingga sulit untuk dipahami, tetapi dalam pengertian Bahasa Indonesia kata baku dari *governing* adalah mengatur dan mengurus. Padanan kata *governing* dalam keilmuan perlu dilakukan sebuah perbandingan, di mana perlu dibandingkan dengan konsep-konsep kunci yang harus diadaptasi misalnya: konsep *ruling* (menguasai), konsep *governing* (mengatur dan mengurus), konsep *ordering* (menata atau menciptakan) dan konsep *steering* (mengarahkan). Perbuatan memerintah atau *governing* memang sangat licin. Para ilmuwan menafasirkannya secara berbeda-beda, baik dalam pengertian *ordering*, *ruling*, *regulating*, maupun *steering*. Dalam praktik perbuatan memerintah selalu dipahami sebagai mengatur (*reegeren*) dan mengurus (*bestuuren*).

Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Iriani, 2023) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses transformasi sosial yang berorientasi pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia, yang melibatkan penggalan potensi internal individu maupun kolektif dalam masyarakat. Proses ini mencakup penguatan kemampuan individu, pengembangan kreativitas, peningkatan kompetensi berpikir, serta dorongan untuk melakukan tindakan yang lebih progresif dan berdaya guna. Pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan akses kepada sumber daya dan informasi, tetapi juga membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkompetisi di era modern. Proses ini diharapkan dapat membangun ketahanan masyarakat, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan yang cepat dan kompleks. Selain itu, melalui pemberdayaan, diharapkan tercipta kesadaran kolektif di antara anggota masyarakat untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut (Nurhidayat, 2023) Dasar pemberdayaan masyarakat adalah untuk menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengelola urusan kemasyarakatannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kolektif dalam suatu kelompok, yang sebelumnya berada pada kondisi yang kurang memadai, menuju suatu keadaan yang lebih baik dan berdaya. Proses ini tidak hanya sekadar mengandalkan intervensi eksternal, melainkan juga sangat bergantung pada

partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, di mana keterlibatan mereka menjadi kunci utama dalam menciptakan transformasi yang berkelanjutan.

Menurut Soeharto (Sinaga & dkk, 2024), menyatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang diharapkan dari suatu proses perubahan sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang mandiri, memiliki kontrol, serta pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik di bidang fisik, ekonomi, maupun sosial. Pemberdayaan petani dapat terjadi melalui beberapa jenis, antara lain:

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, atau pemahaman kepada individu maupun kelompok, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, wawasan, dan keterampilan mereka dalam bidang tertentu.

b. Bantuan

Bantuan di sektor pertanian dapat berupa penyediaan teknologi, pelatihan tentang teknik pertanian, pemberian bibit unggul, bantuan dana, serta informasi terbaru mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan.

c. Pelatihan

Pelatihan di bidang pertanian memberikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan praktis kepada petani. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan praktik

pertanian, serta memperkenalkan teknologi dan metode terbaru untuk meningkatkan hasil pertanian.

d. Pendampingan

Pendampingan di sektor pertanian adalah bimbingan yang diberikan oleh ahli kepada petani. Tujuannya untuk membantu petani menerapkan praktik yang lebih efektif, memahami perubahan pasar, dan meningkatkan keterampilan agar hasil pertanian dan keberlanjutan usaha mereka dapat ditingkatkan.

5. Kesejahteraan

Menurut (Friedlander, 1961) dalam (Nurhanifa & Ansori, 2024) Kesejahteraan adalah sistem terstruktur yang meliputi layanan-layanan sosial yang bertujuan membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup yang baik, serta hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi secara maksimal dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut (Asiyah & Dkk, 2023) Istilah kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mencerminkan suatu kondisi yang aman, makmur, tenteram, serta terbebas dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan. Secara yuridis-normatif, pengertian kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikannya sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan dasar manusia baik dalam aspek material, spiritual, maupun sosial—dapat terpenuhi secara memadai. Pemenuhan ini

bertujuan untuk memungkinkan setiap warga negara hidup secara layak, bermartabat, serta memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut David McClelland, seperti yang dikutip dari (Ahamd & Nihayatul, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024), kesejahteraan dapat dicapai melalui pengembangan etos kerja yang positif. Dalam pandangan ini, individu sendiri memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depannya serta kesejahteraannya. Proses ini akan terwujud apabila seseorang mampu menjadi pesaing yang tangguh dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Dengan kata lain, keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dorongan internal dan komitmen individu untuk terus meningkatkan diri. Dalam konteks ini, etos kerja yang baik menjadi fondasi yang esensial untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan yang ada di lingkungan sekitar.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, peneliti menggunakan metode yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini meliputi pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis yang sesuai dengan fokus kajian, sehingga dapat memberikan hasil yang valid dan relevan dengan masalah yang diangkat. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Metode kualitatif Menurut Moleong (2019) dalam (Yulianti & dkk, 2024) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung.

Adapun pendekatan eksplanatif, Creswell (2014) menjelaskan bahwa pendekatan eksplanatif dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dengan menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku atau kejadian tertentu. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Upaya Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menunjang kesejahteraan petani kopi.

c. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek terdiri dari individu-individu yang berperan sebagai informan utama dalam menyediakan data atau narasumber yang berkontribusi aktif selama proses pengumpulan

informasi. Keberadaan subjek menentukan validitas dan relevansi temuan, serta memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Umur (Tahun)
1	Heri Suprpto	Lurah	63
2	Tulus Budi Wiratno	Carik	56
3	Andi Ferdana	Kasi Kesejahteraan	32
4	Pramuji	Pangripta	50
5	Deny Nur Fitriyanto	PPL Desa	44
6	Suroto	Petani Kopi	51
7	Mugiyanto	Petani Kopi	49

Sumber: Data Hasil Wawancara

Penulis memilih total 7 orang sebagai informan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dan mengolah data serta temuan yang diperoleh di lapangan secara lebih mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan

mendokumentasikan kejadian dalam situasi nyata tanpa melakukan intervensi atau perubahan terhadap kondisi yang diamati (Romdona & dkk, 2025). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menggali informasi mengenai cara-cara fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam upaya mendukung kesejahteraan para petani kopi. Selain itu, peneliti berusaha untuk memahami secara mendalam kondisi lingkungan di sekitar terutama perkebunan kopi, serta sejauh mana sumber daya tersebut telah dimanfaatkan oleh para petani. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, serta kontribusi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat petani kopi di Kalurahan Kepuharjo.

b. Wawancara

Menurut Rosyid (2022) dalam (Romdona & dkk, 2025), Wawancara merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya ketika peneliti membutuhkan data yang bersifat subjektif dan mendalam. Terdapat berbagai jenis wawancara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode wawancara yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, petani kopi, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong kesejahteraan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon

Cangkringan, Kabupaten Sleman. Melalui wawancara mendalam ini, penulis berusaha menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa serta tantangan yang dihadapi oleh para petani, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika interaksi antara pemerintah desa dan petani kopi, serta bagaimana fasilitasi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data tertulis, gambar, serta audio, yang relevan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari observasi atau wawancara, menyediakan informasi faktual, historis, atau administratif yang sulit diperoleh langsung. Dokumentasi membantu meningkatkan akurasi dan validitas data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam (Herman & dkk, 2024), analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengolah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci menjadi unit-unit, menyusun pola, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, dan

menarik kesimpulan agar mudah dipahami. Adapun susunan dari teknik analisis data penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menyaring, merangkum, dan memfokuskan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dan signifikan yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga melakukan identifikasi terhadap elemen-elemen penting yang berkaitan dengan fasilitasi pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan petani kopi. Dengan demikian, informasi yang dianggap tidak terkait atau kurang relevan dapat dihilangkan, sehingga memudahkan proses pengolahan data dan sekaligus memperjelas fokus dari penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data (Displai Data)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dengan tujuan untuk menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam format yang tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga menarik secara visual, seperti tabel, grafik, dan narasi deskriptif yang terperinci. Penyajian ini tidak sekadar bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian, melainkan juga untuk memastikan bahwa pembaca dapat dengan cepat dan mudah menangkap hubungan yang ada antara variabel-variabel yang telah diteliti. Dengan memanfaatkan

teknik visualisasi yang tepat serta narasi yang terstruktur secara sistematis, peneliti berupaya untuk menampilkan data dalam cara yang memudahkan interpretasi, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai fasilitasi pemerintah desa dalam menunjang kesejahteraan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah proses menyimpulkan temuan berdasarkan analisis data dengan mengidentifikasi pola, hubungan, atau makna untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan akurasi, validitas, dan keandalan kesimpulan, melalui pengecekan ulang, perbandingan dengan teori atau temuan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji simpulan yang telah diambil dengan data perbandingan teori yang dimaksudkan untuk melihat kebenaran analisis simpulan yang dapat dipercaya.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KEPUHARJO DAN PETANI KOPI

A. Sejarah Kalurahan Kepuharjo

Kalurahan Kepuharjo dibentuk pada tahun 1952 dan sebelumnya dikenal dengan nama Kepuhsari pada masa kolonial. Selama ini lokasi balai desa beberapa kali berpindah-pindah, antara lain ke Dusun Kepuh, Batur, dan Petung. Pada tahun 1981, nama Desa Kepuharjo resmi digunakan dan Balai Kalurahan dipindahkan ke Dusun Kopeng pada tahun 2010. Sejak itu, Kepuharjo telah mengalami delapan kali pergantian kepala desa. Berdasarkan catatan sejarah, kepemimpinan yang paling lama menjabat adalah Bapak Ngatmo Wagito dari Dusun Petung yang menerima dua penghargaan Kalpataru bidang lingkungan hidup dari Presiden Soeharto. Sayangnya, plakat penghargaan tersebut hilang akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 2010.

Saat itu perangkat kalurahan hanya terdiri dari:

1. Lurah : Kepala Desa
2. Sekdes : Bagian Umum
3. Bagian kemasyarakatan : Urusan Agama
4. Kemakmuran
5. Sosial

Kepala Kalurahan yang pernah memimpin, yakni:

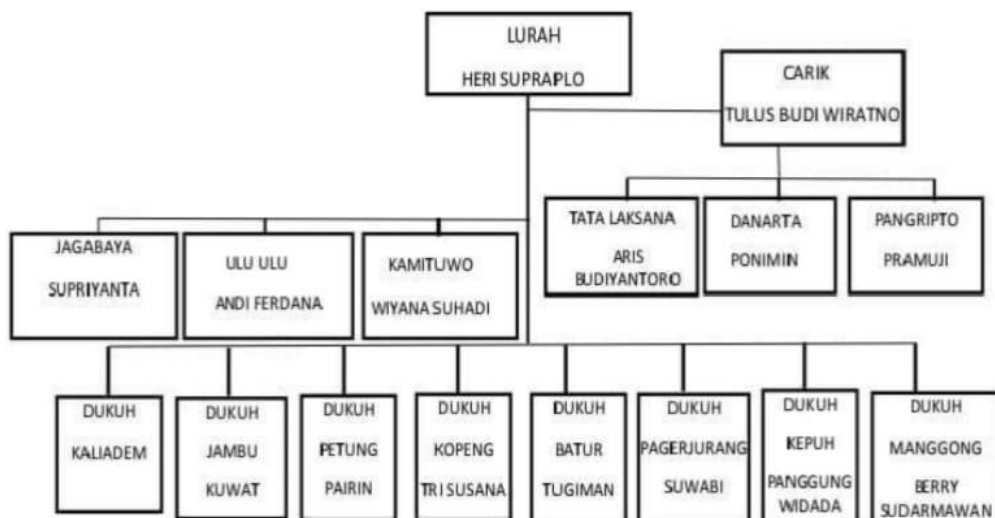
1. Kades I : Bapak Kromo Diarjo
2. Kades II : Bapak Sastro Wiyono
3. Kades III : Bapak Noto

4. Kades IV : Bapak Cipto Wiyono
5. Kades V : Bapak Ngatmo Wagito
6. Kades VI : Bapak Sujudi
7. Kades VII : Bapak Agustina Pujiwinarno, SS
8. Kades VIII : Bapak Heri Suprpto (2007-2013)
9. Kades IX : Bapak Heri Suprpto (2013-2019)
10. Kades X : Bapak Heri Suprpto (2020-2026)

Sehingga dari awal terbentuknya Desa Kepuharjo, Kalurahan ini sudah dipimpin oleh delapan Kepala Desa/Kalurahan.

B. Struktur Pemerintahan

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman



Sumber: RPJM Kalurahan Kepuharjo 2021

Dari gambar di atas menggambarkan struktur organisasi Kalurahan Kepuharjo. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Kalurahan Kepuharjo memiliki susunan organisasi, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Keterangan Struktur Pemerintahan

Lurah	Kepala Desa
Carik	Sekretaris Desa
Tata Laksana	Tata Usaha
Danarta	Kaur keuangan
Pangripta	Kepala Urusan Perencanaan
Jaga Baya	Kasi Pemerintah
Ulu-Ulu	Kasi Kesejahteraan
Kamituwo	Kasi Pelayanan
Dukuh	Kepala Dusun

Sumber: Profil Kalurahan Kepuharjo

C. Visi dan Misi Kalurahan Kepuharjo

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kalurahan Kepuharjo saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), maka untuk pembangunan Kalurahan Kepuharjo pada periode 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2021-2026), disusun visi, sebagai berikut:

“Terciptanya masyarakat Kalurahan Kepuharjo yang sejahtera dan mandiri dengan potensi lokal yang berdayaguna dan berkesinambungan” Visi ini mencerminkan harapan kesejahteraan serta kemandirian yang dimiliki setiap masyarakat Kepuharjo dengan memanfaatkan potensi lokal yang mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang berkelanjutan.

2. Misi

Misi Kalurahan Kepuharjo merupakan penjabaran yang lebih operasional daripada visi. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Kalurahan Kepuharjo maka disusunlah misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong serta mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sektor perekonomian.
- b. Menjalin mitra dengan pemerintah dan pengusaha untuk meningkatkan budi daya hasil pertanian, kehutanan rakyat, peternakan dan sumber-sumber lain.
- c. Menggali sumber-sumber pendapatan potensial Kalurahan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- d. Mengusahakan industri rumah tangga dan industri kecil paska panen hasil pertanian, hutan rakyat, peternakan, dan lain-lain.
- e. Bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi, untuk menambah ketrampilan pengolahan hasil dan fermentasi pakan ternak khususnya bagi peternak, dan juga bidang-bidang lainnya.
- f. Membangun serta mendorong kemitraan dalam upaya pengembangan terutama dalam bidang pertanian dan peternakan, serta bidang-bidang yang lain.
- g. Menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.

- h. Meningkatkan dan mendorong sikap masyarakat yang bertanggung jawab, ramah dan mandiri.
- i. Menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun Kalurahan.
- j. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program Kalurahan baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan.

D. Kondisi Geografis

Kalurahan Kepuharjo yang terletak kurang lebih 4,5 km sebelah utara Kapanewon Cangkringan dan 27 km sebelah timur laut ibukota Sleman, memiliki akses yang sangat mudah, mudah dijangkau dan terhubung dengan wilayah lain di sekitarnya melalui jalur transportasi darat. Wilayah Kecamatan Kepuharjo secara geografis terletak pada koordinat 07O40'42.7"LS - 07O43'00.9"LS dan 110O27'59.9"BT - 110O28'51.4"BT. Dilihat dari topografinya, ketinggian wilayah Kepuharjo adalah 600-1200 m dpl dengan curah hujan rata-rata 2500 mm/tahun dan suhu rata-rata 16-17°C per tahun.

Tabel 2. 2 Batas Wilayah Kalurahan Kepuharjo

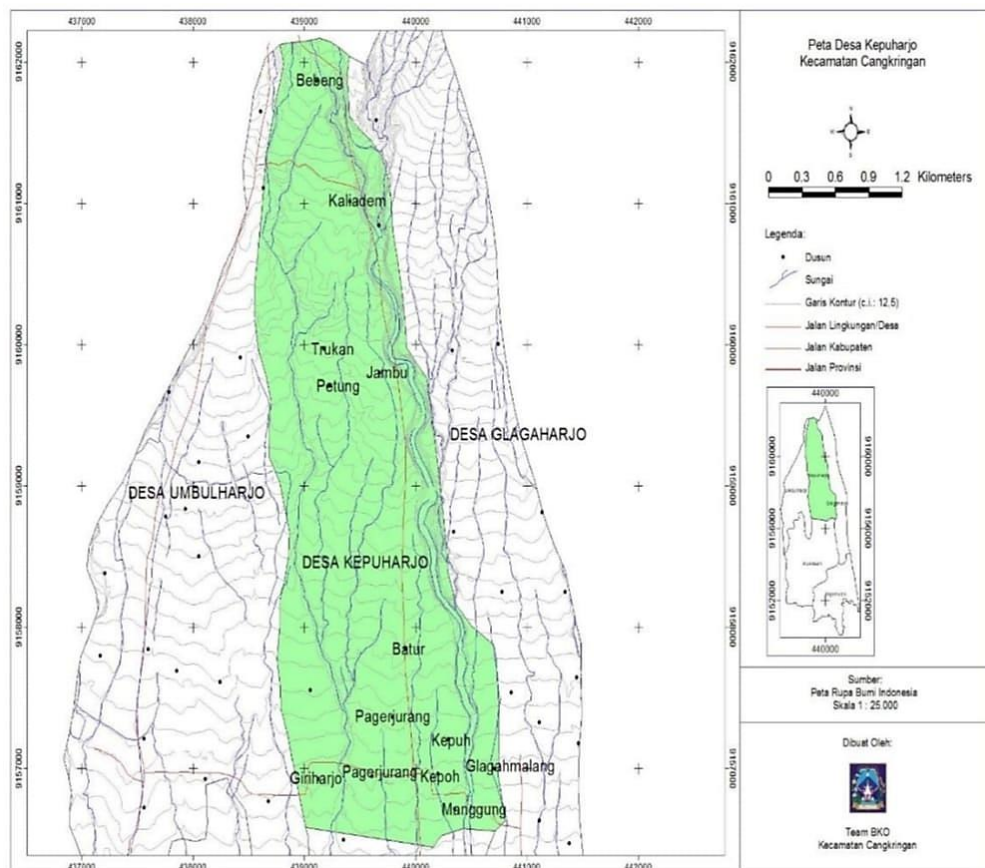
Batas	Wilayah
Utara	Area Puncak Gunung Merapi
Timur	Desa Glagaharjo
Selatan	Desa Wukirsari
Barat	Desa Umbulharjo

Sumber: Website Resmi Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman

Kalurahan Kepuharjo, yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Area Puncak

Gunung Merapi di sebelah utara, Desa Glagaharjo di sebelah timur, Desa Wukirsari di sebelah selatan, dan Desa Umbulharjo di sebelah barat. Batas-batas ini mencerminkan posisi strategis Kalurahan Kepuharjo sebagai salah satu wilayah di lereng Gunung Merapi.

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Kalurahan Kepuharjo



Sumber: RPJM Kalurahan Kepuharjo 2021

Kalurahan Kepuharjo dilintasi oleh dua sungai besar yaitu Sungai Gendol dan Sungai Opak. Sungai Gendol terletak di sisi timur wilayah Desa Kepuharjo dan merupakan jalur aktif Gunung Merapi yang berbatasan dengan Desa Glagaharjo. Sedangkan Sungai Opak mengalir di sisi barat dan membelah wilayah Desa Kepuharjo. Sungai ini juga merupakan salah satu saluran Pegunungan Merapi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang untuk

menghadapi kemungkinan erupsi Gunung Merapi dan lahar dingin yang terbawa banjir saat hujan turun di puncak gunung. Dalam situasi seperti itu, setiap kali terjadi erupsi Merapi atau banjir lahar dingin, pemerintah Kabupaten Kepuharjo bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD Provinsi DI Yogyakarta dan BPBD setempat.

E. Kondisi Demografis

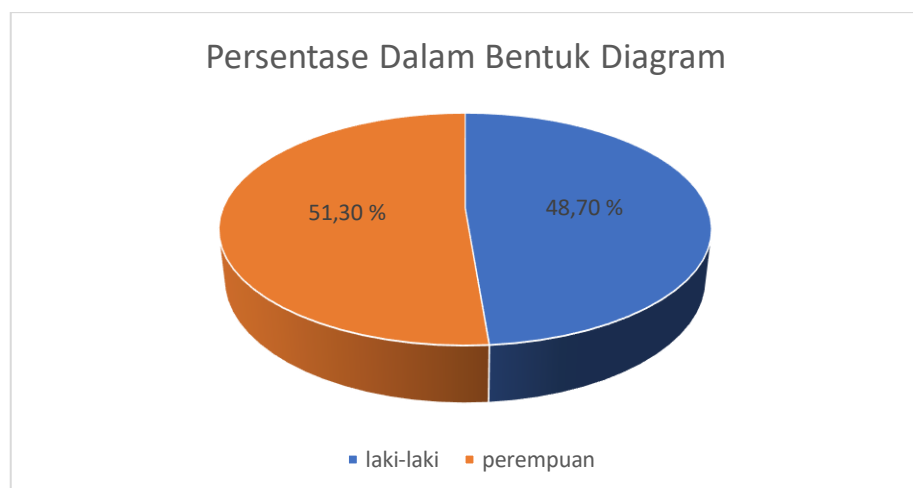
1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.692 jiwa
2.	Perempuan	1.782 jiwa
	Total	3.474 jiwa

Sumber: Laporan Penduduk Desa Kepuharjo 2024

Gambar 2. 3 Diagram Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

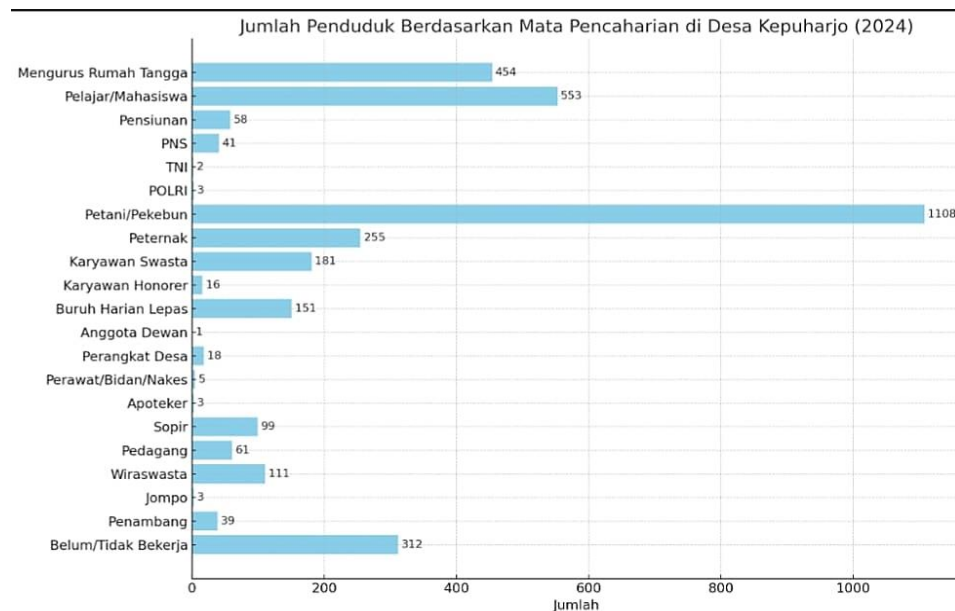


Berdasarkan data di atas, total penduduk Kalurahan Kepuharjo adalah 3.474 jiwa yang terdiri laki-laki dan perempuan. Dari jumlah

tersebut, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 1.692 jiwa jika dipersentasikan menjadi 48,70%, sementara penduduk perempuan sedikit lebih banyak, yaitu 1.782 jiwa yaitu sejumlah 51,30%. Data ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, dengan selisih sebesar 90 jiwa atau sekitar 2,6%.

2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Gambar 2. 4 Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian



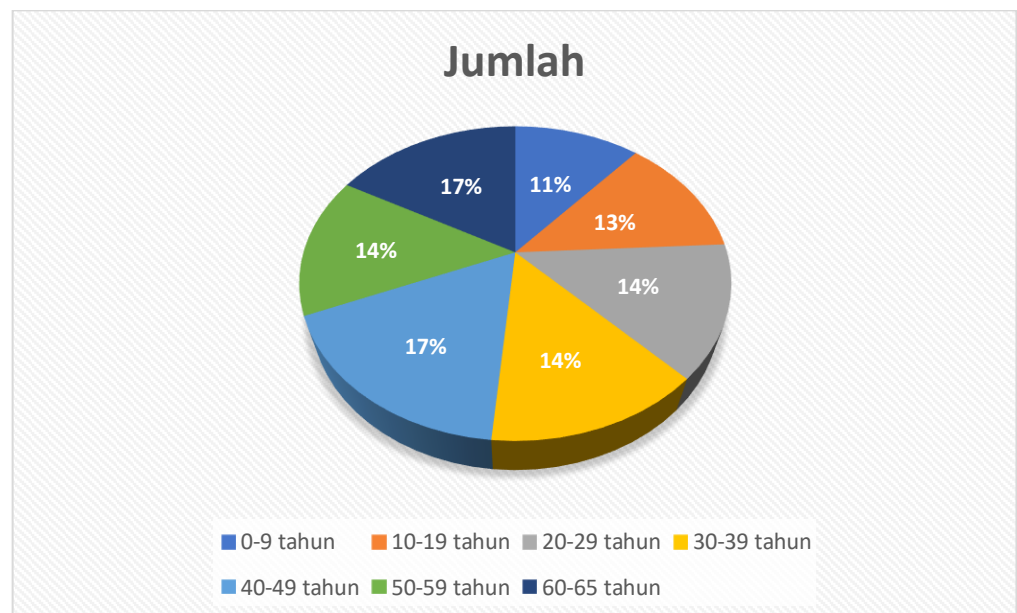
Sumber: Laporan Penduduk Desa Kepuharjo 2024

Berdasarkan data pada gambar diatas menunjukan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun dengan jumlah 1.108 orang. Kelompok terbesar berikutnya adalah pelajar atau mahasiswa sebanyak 553 orang, diikuti oleh penduduk yang mengurus rumah tangga sejumlah 454 orang. Sektor lain seperti peternak 255 orang, buruh harian lepas 151 orang, dan karyawan swasta 181 orang juga cukup signifikan. Sebaliknya, pekerjaan seperti anggota dewan 1 orang, TNI 2 orang, POLRI 3 orang, dan

apoteker 3 orang memiliki jumlah paling sedikit. Total keseluruhan penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah 3.474 orang. Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun, Kalurahan Kepuharjo memiliki potensi besar dalam sektor agraris, sehingga kebijakan pemberdayaan di bidang pertanian/perkebunan menjadi sangat relevan untuk mendukung perekonomian daerah.

3. Jumlah Penduduk menurut Usia

Gambar 2. 5 Diagram Jumlah Penduduk menurut Usia



Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa penduduk umur 40-49 tahun merupakan kelompok penduduk terbanyak menurut kelompok umur yaitu sebanyak 597 jiwa. Kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil saat ini adalah kelompok usia 0-9 tahun dengan jumlah 394 jiwa. Selain itu, jumlah penduduk usia produktif yakni sekitar 1.393 jiwa dan lanjut usia dengan jumlah 1.090 jiwa.

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	141	15,04	148	15,96	289
2.	SD	187	19,95	161	17,36	348
3.	SLTP	172	18,35	172	18,55	344
4.	SLTA	362	38,63	336	36,24	698
5.	Diploma	33	3,52	94	10,14	136
6.	Sarjana	42	4,48	94	10,14	136
Total		937	100	927	100	3.474

Sumber: Laporan Penduduk Desa Kepuharjo 2024

Dari total 3.474 penduduk, mayoritas berada pada tingkat pendidikan SLTA, dengan 698 individu (38,63% laki-laki dan 36,24% perempuan). Pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, seperti Tidak Tamat SD, SD, dan SLTP, terdapat 289, 348, dan 344 individu masing-masing, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih memiliki pendidikan di bawah tingkat menengah. Sementara itu, jumlah individu yang mencapai pendidikan Diploma dan Sarjana relatif kecil, yaitu masing-masing 136 individu, dengan proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

5. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.465
2.	Hindu	9
Total		3.474

Sumber: Laporan Penduduk Desa Kepuharjo 2024

Berdasarkan data tabel di atas, mayoritas penduduk Kalurahan Kepuharjo beragama Islam dengan jumlah 3.465 jiwa, sedangkan yang beragama Hindu hanya 9 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kepuharjo mempunyai karakter kawasan yang religius. Dengan menonjolkan budaya Islam Jawa dan melestarikan tradisi seperti Dekahan, Pitonan, Selapanan, Rasulan, Muludan dan Syawalan, Desa Kepuharjo menawarkan peluang besar untuk berkembang dalam berbagai aspek. Dominasi penduduk Muslim memudahkan proses penataan dan konsolidasi masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

F. Kondisi Ekonomi

Kawasan Desa Kepuharjo dengan luas kurang lebih 875 Ha terbagi dalam berbagai kegunaan seperti bangunan umum, jalan, ladang/tegalan, peternakan, pemukiman, kuburan, tempat wisata, lapangan golf, lapangan olahraga/ruang terbuka, hunian tetap, sekolah, perkantoran dan lain-lain.

G. Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo

Tabel 2. 6 Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo per Padukuhan

No	Padukuhan	Jumlah RT	Luas Pekarangan	Luas Tegalan	Jumlah Luas Total
1.	Kaliadem	4	420.820	296.600	717.420
2.	Jambu	4	375.975	218.250	594.225
3.	Petung	4	570.580	405.860	976.440
4.	Kopeng	5	3.339.465	294.645	617.610
5.	Batur	4	317.505	318.865	617.370
6.	Pagerjuran	4	227.495	322.325	549.820
7.	Kepuh	4	255.795	400.325	65.612
8.	Manggong	4	174.930	256.815	431.745
Jumlah Total		33	5.626.565	2.513.685	4.644.242

Sumber: Profil Kalurahan Kepuharjo

Kalurahan Kepuharjo, yang terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, mencakup 8 padukuhan dengan total 33 RT. Wilayah ini memiliki luas keseluruhan sekitar 4.644.242 hektar, yang terbagi menjadi area pekarangan dan tegalan. Padukuhan yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kaliadem, Jambu, Petung, Kopeng, Batur, Pagerjurang, Kepuh, dan Manggong.

Pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, warga Desa Kepuharjo harus berpindah tempat tinggal. Letusan tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta sarana dan prasarana terkait. Sebagian warga kini tinggal di hunian tetap di Batur dan hunian tetap di Pagerjurang. Hunian tetap Pagerjurang ditempati oleh sebagian warga Padukuhan Pagerjurang, Kepuh, Manggong, Kaliadem dan Petung yang mendiami tanah kas desa di selatan Merapi Golf. Sedangkan Perumahan Tetap Batur merupakan tempat tinggal sebagian kecil warga Padukuhan Batur, Kopeng dan Jambu. Padukuhan Kopeng sendiri masih dihuni oleh sebagian warga yang menerapkan prinsip “Living In Harmony” yang bermakna hidup harmonis berdampingan dengan alam yaitu gunung merapi. Adapun wilayah yang ditinggalkan warga untuk menempati hunian tetap dimanfaatkan untuk kegiatan seperti bertani, bercocok tanam, pengembangan wisata, dan peternakan.

H. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

No	Padukuhan	Tingkat Kesejahteraan (KK)				Keterangan
		Sejahtera	Pra Sejahtera 1	Pra Sejahtera 2	Miskin	
1	Kaliadem	15	54	32	32	133
2	Jambu	11	15	67	12	105
3	Petung	15	20	53	17	105
4	Kopeng	36	32	40	20	128
5	Batur	60	42	17	13	132
6	Pagerjuran	20	28	61	24	133
7	Kepuh	21	36	23	24	104
8	Manggong	12	34	25	17	80
Total		190	261	318	159	920

Sumber: Laporan Penduduk Desa Kepuharjo 2024

Data ini mencerminkan realitas sosial-ekonomi yang beragam, di mana terdapat perbedaan signifikan antara jumlah KK yang tergolong sejahtera, prasejahtera, dan miskin. Dari total 920 KK, hanya 190 KK (20%). Sedangkan jumlah masyarakat prasejahtera ditambah dengan jumlah masyarakat miskin menjadi 738 KK (80%). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar keluarga yang memerlukan intervensi untuk diberdayakan. Penting untuk dipahami bahwa terdapat perbedaan yang relatif kecil antara kelompok masyarakat miskin dan prasejahtera, sehingga keduanya seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan fungsinya, ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam melindungi, mengayomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

I. Potensi Ekonomi

Kalurahan Kepuharjo mempunyai berbagai potensi perekonomian antara lain sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan serta destinasi wisata seperti lava tour dan lapangan golf yang bertaraf internasional. Potensi ini mampu menampung tenaga kerja lokal dari Kalurahan Kepuharjo dan masyarakat sekitar.

Gambar 2. 6 Lapangan Golf Merapi



Wilayah Kalurahan Kepuharjo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa lahan pertanian khususnya kopi dan kawasan hijau untuk pakan ternak. Lahan yang digunakan untuk pertanian/perkebunan ditanami berbagai jenis tanaman seperti jagung, vanili, singkong, sengon, talas serta berbagai tanaman sayuran seperti cabai, tomat, buncis, labu siam dan lain-lain dengan sistem tumpang sari.

Gambar 2. 7 Kebun Talas



Gambar 2. 8 Kebun Cabe Rawit



Gambar 2. 9 Kebun Sengon



Selain pertanian, Kalurahan Kepuharjo juga mempunyai Potensi berbagai daya tarik wisata khususnya pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010 antara lain wisata lava tour di utara Dusun Kaliadem, wisata lava tour di Padukuhan Jambu dengan wisata unggulan “Objek Wisata Batu Alien”, Hobbit House, dan Stone Hange. Pengelolaan daya tarik wisata yang profesional akan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata secara menyeluruh, yang diharapkan dapat memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan menyeimbangkan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung

optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dan meningkatkan citra daerah di mata masyarakat luar Kalurahan Kepuharjo. Untuk kelangsungan operasional dan pemeliharaan kawasan wisata, seluruh tempat wisata di Kepuharjo mengenakan tiket masuk dan biaya parkir sepeda motor, jeep, mobil, bus dan kendaraan wisata lainnya yang memasuki objek wisata. Objek wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri pada hari-hari biasa dan terutama pada hari Minggu dan hari libur.

Gambar 2. 10 Lava Tour Merapi



Gambar 2. 11 Stonehenge



J. Gambaran Umum Potensi Kopi dan Kelompok Tani

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan wilayah Kalurahan Kepuharjo, baik secara langsung dalam

membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan menciptakan ketahanan pangan, serta secara tidak langsung berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan dan hubungan yang sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya.

Sektor perkebunan kopi di Kalurahan Kepuharjo sangat cocok dan merupakan sektor unggulan dalam sektor perkebunan. Memasarkan produksi kopi berupa kopi olahan dengan merek “Kopi Merapi” yang diproduksi, diolah dan dipasarkan di Padukuhan Petung dengan nama Kopi Merapi.

Gambar 2. 12 Kopi Merapi



Kalurahan Kepuharjo terdiri dari 8 padukuhan, masing-masing memiliki kelompok tani yang berperan penting dalam pengembangan pertanian lokal. Kelompok tani di setiap padukuhan berfungsi sebagai wadah kolaborasi bagi para petani untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Melalui kegiatan pertanian yang terorganisir, kelompok tani ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa dan berbagai program pertanian, kelompok tani di Kalurahan Kepuharjo

diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar Kelompok Tani di Kalurahan Kepuharjo

No	Padukuhan	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Jambu	Dadi Makmur	25
2.	Batur	Sido Maju	20
3.	Petung	Cipto Makmur	18
4.	Kepuh	Rukun	29
5.	Pagerjurang	Maju Mulyo	25
6.	Kaliadem	Ngudi Makmur	23
7.	Manggong	Ngudi Mulyo	27
8.	Kopeng	Maju Makmur	31
Total			198

Sumber: Data Hasil Wawancara 18 Februari 2025

Tabel 8 menyajikan data mengenai persebaran serta nomenklatur kelompok tani yang tersebar di delapan padukuhan yang berada dalam wilayah administratif Kalurahan Kepuharjo. Adapun rincian yang tercantum menunjukkan bahwa masing-masing padukuhan memiliki minimal satu kelompok tani yang aktif, dengan jumlah anggota yang bervariasi. Dengan demikian, keberadaan kelompok tani di tiap padukuhan bukan sekadar sebagai sarana administratif, melainkan juga sebagai manifestasi dari kemandirian dan solidaritas agraris yang dapat menjadi dasar dalam proses fasilitasi dan intervensi pemerintah desa guna menunjang kesejahteraan petani.

Secara umum, produk pertanian yang dihasilkan oleh kelompok tani di Kalurahan Kepuharjo didominasi oleh tanaman palawija dan hortikultura. Namun komoditas pertanian yang paling unggul di Kalurahan Kepuharjo adalah

kopi. Masyarakat Desa Kepuharjo yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pemilik perkebunan terus berupaya meningkatkan produktivitas perkebunannya. Hasil perkebunan warga Kepuharjo antara lain kopi Arabika dan Robusta. Kedua jenis kopi ini tumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak buah di tanah yang subur dan gembur. Namun, varietas Robusta adalah yang paling cocok. Kopi jenis ini juga paling disukai para petani karena relatif mudah dalam budidaya dan pemeliharaannya. Para petani terus berupaya menanam bibit kopi baru untuk menjamin keberlangsungan perkebunan mereka. Mereka menerima bibit tersebut baik dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perkebunan atau dengan dukungan dari sektor swasta. Ada pula yang mendapatkan bibit melalui kelompok tani.

BAB III

FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI KOPI

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan atas temuan-temuan yang diperoleh melalui proses observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi mengenai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk mengaitkan data tersebut dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menelaah bagaimana pemerintah desa menciptakan interaksi yang produktif, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan kapasitas individu dalam mencapai tujuan bersama.

A. Menciptakan Interaksi Yang Produktif

Pemerintah Kalurahan Kepuharjo, sebagai representasi aspirasi masyarakat, memiliki peran dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendorong bagi para petani untuk secara proaktif terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Konsep *governing*, yang dipahami sebagai suatu usaha untuk mengatur dan mengurus, seharusnya mencakup proses, fungsi, dan hasil yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat tidak semata-mata bersifat administratif dan instruktif, melainkan

diwujudkan dalam bentuk dinamika kerja sama yang konstruktif. Dalam implementasinya, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo berupaya menciptakan interaksi yang produktif dengan membangun ruang diskusi bagi petani, melalui pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan kelompok tani. Yang bertujuan memberikan ruang bagi pertukaran ide, serta memperkuat jaringan sosial di antara petani.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Tulus Budi Wiratno selaku Carik Kalurahan Kepuharjo:

“Kami memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan kepada kelompok tani. Di Kepuharjo, terdapat delapan kelompok tani yang rutin mengadakan forum pertemuan setiap bulan untuk merumuskan keputusan terkait bantuan yang mungkin diperlukan, yang kemudian disalurkan ke kalurahan. Kami tidak mencampuri urusan internal kelompok, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk mengusulkan kebutuhan mereka”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memberikan ruang kepada para petani untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak kalurahan. Forum pertemuan yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan mencerminkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi interaksi antara kalurahan dan para petani, melalui pembentukan kelompok tani yang ada di setiap padukuhan.

Pernyataan dari Suroto selaku petani kopi:

“Ya kita selama ini ya saling sharing apa-apa saja yang dibutuhkan seperti butuh bantuan pupuk, bibit sampai ke teknologi itu nanti kami sampaikan melalui kelompok tani daan dirembuk dulu baru nanti disampaikan ke pemerintah desa”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah pemerintah desa dalam memberikan wewenang kepada kelompok tani untuk mengelola program yang telah disusun, mencerminkan pemerintah tidak semata-mata sebagai pelaksana kebijakan secara *top-down*, melainkan sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk aktif berperan dalam proses pembangunan. Yang mana pemerintah memberikan otoritas dan membuka peluang kepada petani khususnya untuk bekerja secara mandiri namun tetap dalam naungan Pemerintah Desa dalam kelompok yang sudah terstruktur.

Dalam konsep *governing* sendiri, fasilitasi dimaknai sebagai tindakan aktif Pemerintah dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berdaya secara mandiri. Langkah-langkah seperti membentuk wadah komunikasi, membangun struktur organisasi petani (kelompok tani dan gapoktan), serta memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola program dan menerima bantuan adalah bentuk nyata dari perbuatan fasilitasi tersebut.

Di Kalurahan Kepuharjo sendiri anggota kelompok tani terdiri berbagai macam petani, diantaranya adalah petani kopi, dan petani hortikultura. Yang masing-masing memiliki kebutuhan dan keperluan yang berbeda. Untuk itu, selain pertemuan yang diadakan dalam lingkup kelompok, pemerintah desa juga menyampaikan terkait dengan rancangan program dan adanya bantuan melalui ruang terbuka yang diadakan melalui Musyawarah Dusun (MusDus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRenBang).

Berikut wawancara dengan narasumber Heri Suprpto selaku Lurah Kepuharjo:

“Kami biasanya mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta musyawarah dusun (musdus) di setiap dusun untuk memastikan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Dalam proses ini, usulan dari masyarakat disampaikan, dan informasi mengenai program-program, seperti yang baru-baru ini diterima dari kementerian mengenai 500 bibit kopi, disampaikan melalui pak dukuh. Saat ini, dengan adanya media sosial, informasi dapat disebarkan lebih cepat, karena kami membagikannya ke grup-grup yang ada, dan pak dukuh juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada para petani”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembangunan di Kalurahan Kepuharjo dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan musyawarah dusun (musdus), yang diadakan di setiap dusun. Pendekatan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan interaksi yang terjalin dengan masyarakat dalam menyampaikan usulan. Selama proses tersebut, informasi tentang program-program, seperti distribusi 500 bibit kopi yang diterima dari kementerian, disampaikan oleh pak dukuh kepada masyarakat. Selain itu, adanya media sosial berperan penting dalam mempercepat penyebaran informasi. Informasi dibagikan melalui grup-grup yang ada, sehingga pak dukuh dapat dengan cepat menyampaikan informasi tersebut kepada para petani.

Gambar 3. 2 Kegiatan (Musrenbang) Musyawarah Rencana Pembangunan



Sumber: Data Hasil Wawancara 14 Mei 2025

Berikut pernyataan dari Deny Nur Fitriyanto, S.PT selaku PPL:

“Kopi di Kepuharjo itu kan merupakan salah satu pertanian budidaya perkebunan yang lumayan cukup luas kopinya cukup banyak, sehingga pemerintah desa tentu saja yang paling pokok perannya, kita setiap ada kegiatan pemerintah kalurahan itu pasti harus tau. Nanti ada arahan dari pemerintah desa kira-kira nanti varietas robusta mana yang akan dapat, nanti kalau arabica daerah mana yang akan dapat”.(Wawancara, 18 Februari 2025)

Dalam pernyataannya, PPL menekankan bahwa keberadaan tanaman kopi di Kepuharjo tidak hanya luas, tetapi juga memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan arahan dan informasi kepada petani mengenai varietas kopi yang akan ditanam, seperti varietas robusta dan arabika, serta lokasi yang tepat untuk budidaya masing-masing. Dengan demikian, interaksi antara pemerintah desa dan petani kopi menjadi krusial, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dapat langsung memengaruhi hasil pertanian.

Selain itu, transparansi anggaran dalam setiap kegiatan menjadi penting untuk membangun kepercayaan antara petani dan pemerintah desa, sehingga disampaikan juga dalam setiap pertemuan terkait dengan anggaran dana. Berikut wawancara dengan Narsumber Heri Suprpto selaku Lurah Kepuharjo terkait dengan transparansi anggaran:

“Dana tersebut bersifat *bottom-up*, di mana pengajuan berasal dari kelompok tani, bukan dari atas ke bawah. Artinya, kelompok tersebut sudah memahami bahwa petani mana yang dapat menerima program ini karena usulan tersebut berasal dari masyarakat, bukan dari pemerintah kalurahan yang menetapkan aturan secara sepihak. Baru nanti DD (Dana Desa) yang 20% ketahanan pangan itu bisa di push ke sana. Karena alokasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung petani kopi, serta petani lainnya”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Tabel 3. 1 Program Sarana dan Prasarana Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023-2024

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Anggaran	Pelaksanaan
1.	Bak Penampung Air Bersih dan Talud Petung	Depan Merapi Golf	162.450.000	Tahun 2023
2.	Bak Penampung Air Bersih	Jambu Lama	107.525.000	Tahun 2023
3.	Bak Penampung Air Bersih	Petung Lama	136.100.000	Tahun 2024

Sumber: Data Hasil Wawancara 14 Mei 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Dana Desa 20% ketahanan pangan yang dialokasikan untuk pertanian kopi dalam bentuk pembangunan fisik berupa pembuatan bak penampungan air bersih di padukuhan yang letaknya diatas karena memang memiliki keterbatasan sumber daya. Yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 sebelum adanya SE Dana Desa (DD) 20% Ketahanan Pangan hanya untuk pengelolaan BumDes. Untuk anggaran Dana Desa 20% Ketahanan Pangan Tahun 2025 sejumlah 198.600.000 ada aturan baru yang mewajibkan dana tersebut di push untuk modal BumDes karena terdapat SE Kementerian.

B. Memungkinkan Partisipasi Aktif

Dalam upaya pemberdayaan petani, partisipasi aktif baik dari petani kopi maupun pemerintah desa menjadi aspek yang sangat krusial. Fasilitas yang efektif tidak dapat berjalan secara sepihak, melainkan membutuhkan keterlibatan dua arah yang saling melengkapi. Petani sebagai subjek utama

dalam proses pemberdayaan harus diberikan ruang untuk menyuarakan kebutuhan, pendapat, dan potensi yang dimiliki. Di sinilah konsep fasilitasi berperan penting, di mana pemerintah desa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan petani dengan sumber daya dan informasi yang diperlukan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Andi Ferdana selaku Kasi Kesejahteraan:

“Kalau untuk kebijakan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur khusus terkait petani kopi itu belum ada, sementara pemerintah desa hanya melakukan dorongan secara lisan dan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan petani kopi untuk mencari bantuan dalam mendukung produktivitas tanaman kopi”.(Wawancara 20 Februari 2025)

Pernyataan dari Lurah Heri Suprpto.

“Kebijakan secara tertulis untuk petani kopi itu memang belum ada tapi kita memberikan kebijakan berupa dorongan lisan dan pemberian fasilitas kepada petani kopi. Karena sebelum erupsi pada tahun 2010, banyak petani kopi dan peternak. Namun, setelah erupsi, lahan pertanian mereka hancur. Oleh karena itu, saya mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai langkah awal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat ini, sektor pariwisata telah berkembang, sehingga saya kini berfokus untuk mendorong pemulihan kebun kopi seperti dulu”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun belum ada kebijakan Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik untuk petani kopi, pemerintah desa telah berusaha melakukan fasilitasi melalui dorongan lisan dan bantuan dalam mencari sumber daya yang diperlukan untuk mendukung produktivitas tanaman kopi. Ini mencerminkan upaya untuk memberdayakan petani. Dalam konsep *Governing*, pemerintah desa telah mengambil langkah yang tepat dengan mengarahkan perhatian pada pemulihan ekonomi pasca-erupsi dengan mendorong pengembangan sektor pariwisata, yang diharapkan dapat

mempercepat pemulihan kebun kopi. Pendekatan ini menunjukkan strategi proaktif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi petani. Namun, untuk memungkinkan partisipasi aktif yang lebih efektif terutama dalam pertanian khususnya kopi, penting bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan tertulis dan meningkatkan komunikasi dengan petani.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Andi Ferdana, selaku Kasi Kesejahteraan, dalam wawancaranya ia menekankan hal yang sama:

“Baru dalam dua tahun terakhir, upaya penanaman kopi kembali digalakkan. Karena tanaman kopi memerlukan waktu lama untuk berproduksi. Jika ditanam pada tahun 2025, baru dapat dipanen pada tahun 2030, dengan frekuensi panen yang hanya sekali atau dua kali setahun. Setelah erupsi, banyak petani yang kehilangan rumah dan sumber daya, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali bertani kopi. Pada tahun 2010, tanah yang mereka miliki masih terpapar abu vulkanik, dan baru sekitar tahun 2018-2019 tanaman kopi mulai berbuah. Selama periode antara 2010 dan 2011, mereka tidak dapat memulihkan ekonomi mereka melalui pertanian, sehingga banyak yang beralih ke sektor pariwisata”.(Wawancara, 20 Februari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meski upaya penanaman kembali kopi baru digalakkan dalam dua tahun terakhir, tantangan tetap ada karena tanaman kopi memerlukan waktu lama untuk berproduksi. Ia menjelaskan bahwa banyak petani tidak dapat kembali bertani kopi setelah kehilangan rumah dan sumber daya akibat erupsi, dengan tanah yang terpapar abu vulkanik menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, meskipun ada harapan untuk menghidupkan kembali kebun kopi, realitas bahwa mereka harus menunggu hingga tahun 2030 untuk hasil panen pertama menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi para petani dalam mengembalikan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, sektor pariwisata menjadi solusi sementara, namun

tetap menyiratkan kebutuhan mendesak untuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan kembali pertanian kopi.

Berikut pernyataan yang disampaikan Bapak Suroto selaku petani kopi di Kalurahan Kepuharjo dalam wawancara ini:

“Dibandingkan dengan daerah lain, Kepuharjo memiliki komoditas kopi yang lebih tinggi. Sebagian besar masyarakat lebih memilih sektor pariwisata sebagai sumber mata pencaharian utama, sementara kopi hanya dijadikan usaha sampingan. Namun, sejak adanya bantuan yang diberikan, semakin banyak petani yang mau untuk menanam kopi lagi”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Dalam wawancara dengan salah seorang petani kopi dari Kalurahan Kepuharjo, mengungkapkan pandangannya mengenai dinamika pertanian kopi di wilayahnya. Ia menekankan bahwa meskipun Kepuharjo memiliki potensi komoditas kopi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, banyak masyarakat di sana justru lebih memilih untuk menggeluti sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang mungkin dipicu oleh potensi ekonomi yang lebih menjanjikan dalam pariwisata, sementara kopi dianggap sebagai usaha sampingan yang tidak terlalu menguntungkan. Namun, Suroto juga mencatat bahwa dengan adanya bantuan dari pemerintah, minat para petani untuk kembali menanam kopi mulai meningkat. Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat untuk kembali mempertimbangkan pertanian kopi sebagai sumber mata pencaharian yang layak, meskipun tantangan dari sektor lain tetap ada. Melalui pernyataan ini, terlihat jelas bahwa kesejahteraan petani kopi di Kepuharjo sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber Pramuji selaku Pangripta

Kalurahan kepuharjo:

“Para petani di kepuharjo ini sejatinya telah menyadari potensi besar yang mereka miliki dalam mengelola perkebunan kopi, terutama di tengah ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengembangkan industri kopi. Kami senantiasa berupaya mendorong para petani untuk kembali menanam kopi pasca-erupsi, di tengah meningkatnya sektor pariwisata di Kepuharjo yang menawarkan prospek lebih menjanjikan. Meskipun kopi telah menjadi komoditas unggulan di daerah ini sejak lama, saat ini kami optimis berkat dukungan kerjasama dari berbagai instansi, termasuk dinas pertanian, pemerintah daerah serta bantuan dari APBN, BKK kalurahan, CSR, dan lainnya. Kami berharap, dengan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memfasilitasi kebutuhan mereka dengan berbagai upaya, para petani akan terdorong untuk terus maju dan mengembangkan pertanian kopi mereka”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Hasil wawancara mengungkapkan keyakinan yang mendalam terhadap potensi para petani kopi di Kepuharjo, dengan sumber daya alam yang melimpah sebagai modal utama dalam pengembangan perkebunan kopi. Dalam konteks pasca-erupsi, di mana sektor pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan, Bapak Pramuji menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong petani kembali menanam kopi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk revitalisasi pertanian. Dengan adanya dukungan dari berbagai instansi, termasuk dinas pertanian dan program-program bantuan lainnya, optimisme terhadap masa depan industri kopi di kepuharjo semakin menguat, sejalan dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan petani, diharapkan kolaborasi ini akan menghasilkan inovasi dan kemajuan yang berkelanjutan dalam sektor pertanian kopi, sehingga membawa dampak positif bagi petani dan perekonomian lokal.

Dengan demikian, untuk mendukung keberhasilan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi aktif dari petani untuk kembali menanam kopi adalah dengan adanya bantuan/fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak melalui pemerintah desa seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber Andi Ferdana:

“Baru-baru ini, kami menerima hibah peralatan pertanian, termasuk cangkul dan berbagai alat lainnya, serta motor tassa untuk mengangkut biji kopi pasca-panen. Kami juga memperoleh alat pemecah dan pengupas biji kopi. 2023 ada gerakan tanam kopi serentak dari Sri Sultan se Indonesia itu nanam di Kepuharjo dari situ kemudian kami dapat fasilitas BKK 300 juta dan dapat bibit kopi juga. Meskipun tidak menggunakan anggaran dari kalurahan, kami berusaha mencari bantuan untuk bibit dan perlengkapan pertanian. Presentase jumlah petani yang menanam kopi meningkat secara signifikan dibandingkan dua tahun lalu”.(Wawancara 20 Februari 2025)

Gambar 3. 3 Rincian Bantuan Dana Provinsi

I. PENDAMPINGAN SEKTOR HULU (BUDIDAYA)									
A. Tanaman Pelindung									
Pete	478	batang	x	16.000					
Jengkol	359	batang	x	16.000					
Alpoket	359	batang	x	36.000					
Jumlah									
B. Pemeliharaan									
Pupuk Kandang Fermentasi	55.000	kg	x	1.500					
NPK	130	kg	x	20.000					
Tricoderma	119	kg	x	90.000					
Jumlah									
C. Peralatan									
Gunting Pangkas	20	unit	x	85.000					
Papan Nama	5	unit	x	200.000					
Sprayer elektrik	20	unit	x	850.000					
Angkong	20	unit	x	650.000					
Cangkul	20	unit	x	150.000					
Jumlah									
D. Pendampingan									
Sekolah Lapang Budidaya Kopi									
Konsumsi Penyelenggaraan	30	orang	x	8 kali	x	35.000			
Instruktur SL	3	orang	x	2 jam	x	100.000	x	8 kali	
Transport peserta	20	orang	x	8 kali		50.000			
Pakaian Kerja	20	orang	x	150.000	buah				
Sepatu boot	20	orang	x	150.000	buah				
ATK	20	orang	x	25.000	buah				
Perjalanan dinas study tiru	2	op	x	8.000.000					
Jumlah									
E. TPK									
Biaya Koordinasi	30	orang	x	4 kali	x	35.000			
Honorarium TPK	4	orang	x	2 bulan		654.000			
Jumlah									
JUMLAH TOTAL I									
II. PENDAMPINGAN SEKTOR HILIR (PANEN DAN PASCAPANEN)									
A. Pasca Panen									
Solar Dryer (pengering)	1	unit	x	72.000.000					
viar roda 3	2	unit	x	34.000.000					
Mesin Pengupas biji kopi	1	unit	x	20.000.000					
Jumlah									
B. TPK									
Biaya Koordinasi	30	orang	x	2 kali	x	35.000			
Honorarium TPK	4	orang	x	3 bulan		425.000			

Sumber: Data Hasil Wawancara 14 Mei 2025

Hasil wawancara dengan narasumber Andi Ferdana menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah dilaksanakan gerakan tanam kopi serentak yang dicanangkan oleh Sri Sultan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalurahan Kepuharjo. Dalam rangkaian kegiatan ini, Kalurahan Kepuharjo memperoleh dukungan dalam bentuk fasilitas berupa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta dan bantuan bibit kopi. Hal ini mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa dalam mendorong revitalisasi budidaya kopi di tingkat lokal.

Berdasarkan rincian bantuan pada gambar yang dilampirkan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek dalam pendampingan sektor hulu dan hilir, mulai dari penyediaan tanaman pelindung, pupuk dan peralatan, pelaksanaan sekolah lapang budidaya kopi, hingga pengadaan sarana pasca panen. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan petani dengan sumber daya dari pemerintah provinsi. Dalam konsep fasilitasi, peran pemerintah desa tidak hanya sebagai penyedia, tetapi juga sebagai penggerak dan pendamping yang menciptakan ruang partisipatif agar petani kopi terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan dari penanaman, perawatan, hingga pascapanen.

Dalam kerangka *governing*, kolaborasi lintas aktor ini menggambarkan praktik tata kelola partisipatif, di mana pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Melalui pendekatan ini, keberhasilan program tanam kopi tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang

ditanam, tetapi juga dari sejauh mana petani merasa memiliki, terlibat, dan diberdayakan dalam proses tersebut.

C. Meningkatkan Kapasitas Individu Untuk Mencapai Tujuan Bersama

Dalam upaya menciptakan tujuan bersama dalam pembangunan pertanian, terutama di sektor kopi, peningkatan kapasitas individu petani menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan yang terstruktur dalam wadah kelembagaan seperti kelompok tani. Melalui pelatihan, petani diberikan pengetahuan teknis tentang budidaya kopi, pelatihan pembuatan pupuk kandang, manajemen usaha tani, hingga strategi pemasaran yang berkelanjutan, sementara penyuluhan menjadi sarana pendampingan yang bersifat edukatif dan partisipatif. Peran Pemerintah Kalurahan Kepuharjo menjadi sangat penting sebagai fasilitator yang tidak hanya memfasilitasi secara administratif, tetapi juga secara sosial dan kultural sebagaimana dijelaskan bahwa fasilitasi merupakan proses yang mendorong, membimbing, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali masalah serta merumuskan solusi secara mandiri.

Pemerintah Desa bukan hanya sebagai aktor yang memutuskan arah pembangunan, melainkan mitra bagi masyarakat dalam menciptakan visi bersama, sesuai dengan visi Kalurahan Kepuharjo yaitu menciptakan kemandirian masyarakat dengan potensi lokal yang berdayaguna dan berkesinambungan. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo tidak sendiri namun didampingi dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang mendukung keberhasilan setiap program yang dijalankan serta bekerja sama dengan Dinas

terkait. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Governing* dari Mazhab Timoho, yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif. Di mana ruang dialog dan partisipasi menjadi kunci utama untuk menciptakan sinergi antar pelaku pembangunan desa.

Dengan demikian, pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan secara inklusif dan partisipatif dalam kelompok tani bukan hanya sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat identitas kolektif, membangun kepercayaan antar pelaku, dan pada akhirnya menyatukan langkah dalam mencapai tujuan bersama yang berorientasi pada kesejahteraan petani kopi.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Mugiyanto selaku petani kopi di Kepuharjo yang menyampaikan:

“Setiap desa itu kan memiliki kelompok tani yang berperan dalam mengelola sektor pertanian di wilayahnya. Selain itu terdapat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan bagi petani. Untuk pelatihan tidak memiliki jadwal tetap, melainkan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan program yang telah direncanakan. Pemerintah desa itu ya berperan sebagai fasilitator dalam mendukung berbagai inisiatif yang dijalankan oleh petani”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Dalam wawancara yang dilakukan dengan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, terungkap bahwa keberadaan kelompok tani di setiap desa memiliki peran yang krusial dalam mengelola sektor pertanian setempat. Petani menjelaskan bahwa kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam praktik pertanian yang lebih baik. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang secara

aktif terlibat dalam penyelenggaraan program pelatihan. Meskipun pelatihan tidak terjadwal secara tetap, hal ini justru memberikan fleksibilitas bagi petani untuk mengikuti program sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif-inisiatif yang diusulkan oleh para petani, sehingga menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani kopi.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Lurah Kepuharjo, Heri Suprpto:

“Koordinasi antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pemerintah desa dilakukan secara rutin setiap minggu di kalurahan. Dalam pertemuan tersebut, dukuh menyampaikan laporan mengenai kondisi pertanian yang kemudian diteruskan kepada kelompok tani untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Sebagai contoh, jika terjadi kerusakan pada tanaman kopi, PPL segera turun ke lapangan untuk memberikan solusi, seperti penyediaan obat. Apabila menghadapi kendala, petani dapat langsung berkoordinasi dengan PPL untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Selain itu, kelompok tani juga aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), untuk mengusulkan program-program terkait pertanian kopi”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Sejalan dengan itu, penjelasan dari narasumber Heri Suprpto bahwa koordinasi antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pemerintah desa berlangsung secara rutin setiap minggu di kalurahan, yang mencerminkan komitmen dalam pengelolaan sektor pertanian. Dalam setiap pertemuan, dukuh berperan penting dengan menyampaikan laporan mengenai kondisi pertanian, yang kemudian diteruskan kepada kelompok tani. Proses ini menciptakan jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan petani, memungkinkan identifikasi masalah yang cepat dan pengambilan keputusan yang tepat.

Selain itu, keberadaan saluran komunikasi yang baik memungkinkan petani untuk langsung berkoordinasi dengan PPL jika menghadapi kendala, yang memperkuat hubungan kerja antara petani dan penyuluh. Keterlibatan kelompok tani dalam pertemuan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) juga menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang penting untuk pengembangan program-program terkait pertanian kopi. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan suara kepada petani, tetapi juga memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan.

Berikutnya, Deny Nur Fitriyanto, S.PT. selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kalurahan Kepuharjo menjelaskan bahwa:

“Kegiatan yang umumnya dilakukan terdiri dari pelatihan yang sering kali disertai bimbingan teknis. Meskipun pelatihan tidak selalu dilaksanakan secara rutin, penyuluhan harus dilakukan minimal setiap hari dengan mengunjungi kelompok-kelompok yang perlu dimonitor. Dalam kunjungan tersebut, evaluasi juga dilakukan untuk menilai efektivitas penyuluhan. Penyuluhan tidak selalu memerlukan pengumpulan kelompok tani, karena pertemuan mereka biasanya diadakan setiap bulan dengan jadwal yang berbeda-beda. Untuk itu mungkin kami tidak dapat hadir di setiap pertemuan malam. Tapi karena kita penyuluh pertanian lapangan jadi ya kegiatannya memang setiap hari diluar”.(Wawancara, 18 Februari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi melalui berbagai kegiatan penyuluhan. Deny menjelaskan bahwa meskipun pelatihan tidak dilaksanakan secara rutin, komitmen untuk melakukan penyuluhan tetap tinggi, dengan frekuensi kunjungan yang minimal setiap hari untuk memantau kelompok-kelompok tani. Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif yang

diambil oleh penyuluh dalam mengevaluasi efektivitas program penyuluhan, meskipun tidak selalu melibatkan pengumpulan kelompok tani secara langsung.

Keterbatasan waktu dan variasi jadwal pertemuan kelompok tani yang diadakan setiap bulan menjadi tantangan tersendiri, sehingga penyuluh harus kreatif dalam menjadwalkan kunjungan mereka. Dengan demikian, meskipun tidak dapat hadir di setiap pertemuan, upaya penyuluhan yang dilakukan setiap hari di luar pertemuan resmi menunjukkan dedikasi dalam mendukung pertanian kopi di Kepuharjo, sekaligus mengindikasikan kebutuhan akan strategi penyuluhan yang lebih fleksibel.

Selain melakukan koordinasi yang baik antara PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Pemerintah Kalurahan Kepuharjo memiliki fungsi untuk mengambil langkah dalam merancang program dalam pemberian pelatihan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan Narasumber Andi Ferdana.

“Sebagian besar warga di Kepuharjo ini memelihara sapi, sehingga menghasilkan limbah kotoran sapi yang melimpah di hunian tetap (huntap) dan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kami menjalin kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman untuk memberikan pelatihan kepada petani mengenai pengolahan limbah ternak sapi menjadi pupuk. Pemdes saat ini belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk memberikan pelatihan langsung kepada petani, serta terdapat keterbatasan anggaran, sehingga kami memerlukan dukungan dari dinas pertanian. Selain itu, kelompok tani juga mendapatkan bantuan berupa mesin pengayak untuk pembuatan pupuk kandang. Untuk tahun 2026, kami telah mengajukan permohonan untuk mesin penyaring”.(Wawancara, 20 Februari 2025)

Gambar 3. 4 Pelatihan Pembuatan Pupuk Kandang



Sumber: Data Hasil Wawancara 14 Mei 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa warga di wilayah Kepuharjo memiliki potensi besar dalam pengelolaan limbah kotoran sapi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman untuk memberikan pelatihan kepada petani menunjukkan upaya pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas. Namun, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran di tingkat pemerintah desa menghambat pelaksanaan pelatihan secara langsung. Dalam konsep fasilitasi yang diterapkan, di mana pemerintah berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan petani dengan sumber daya eksternal, dalam hal ini dinas pertanian, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petani dalam mengolah limbah menjadi pupuk.

Di sisi lain, konsep *governing* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Keterlibatan kelompok tani dalam menerima bantuan mesin pengayak juga mencerminkan prinsip ini, di mana petani berkontribusi aktif dalam mendukung keberlanjutan pertanian. Dengan memberikan pelatihan dan alat yang diperlukan, diharapkan petani dapat mengolah limbah kotoran sapi dengan lebih efisien, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi

juga berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Ini menciptakan sinergi antara pemberdayaan individu dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Pernyataan mengenai peran aktif pemerintah desa dalam memajukan sektor pertanian, khususnya pertanian kopi di Kalurahan Kepuharjo, kembali ditegaskan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang selama ini turut mendampingi dan bersinergi dengan pemerintah desa dalam proses pengembangan pertanian di tingkat lokal, dengan melihat juga kemampuan yang telah dimiliki oleh petani kopi di sana. Berikut merupakan hasil wawancara dengan narasumber Deny Nur Fitriyanto, S.PT. selaku PPL Kalurahan Kepuharjo:

“Para petani di Kepuharjo telah memiliki kemampuan dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari tahap penanaman hingga proses pasca panen. Setiap petani memiliki teori yang telah mereka kembangkan secara individu. Rasa percaya diri masyarakat terhadap kompetensi mereka menjadi modal krusial dalam memajukan pertanian kopi. Namun, peran program ini juga sangat signifikan dalam memperkuat kemampuan dan keyakinan masyarakat. Melalui pelatihan serta adanya kelompok tani, program ini menyediakan wadah bagi para petani untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, yang menciptakan lingkungan kolaboratif dan mendukung kemajuan sektor pertanian”.(Wawancara, 18 Februari 2025)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para petani kopi di wilayah tersebut telah mengembangkan kemampuan yang mumpuni dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari penanaman hingga pasca panen. Masing-masing petani memiliki teori yang telah diasah secara individu, yang berkontribusi pada rasa percaya diri yang tinggi terhadap kompetensi mereka. Hal ini menjadi modal penting dalam memajukan sektor pertanian kopi, di mana

program pemerintah berperan signifikan dalam memperkuat tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga keyakinan masyarakat. Melalui pelatihan dan pembentukan kelompok tani, program tersebut menciptakan platform bagi petani untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, membangun lingkungan kolaboratif yang mendukung kemajuan pertanian secara keseluruhan.

Selain pelatihan dan penyuluhan yang telah diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bersama antara Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dan para petani, diperlukan pula penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang dapat menunjang peningkatan kapasitas petani. Fasilitas ini mencakup akses terhadap alat dan teknologi pertanian yang lebih modern, penyediaan sarana pasca panen, serta dukungan dalam hal pemasaran hasil produksi. Dengan adanya fasilitas pendukung tersebut, diharapkan kemampuan dan kemandirian petani kopi semakin meningkat sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan mereka.

Pernyataan dari Pramuji selaku Pangripta Kalurahan Kepuharjo menyampaikan terkait alur mengajukan proposal bantuan:

“Mesin pengering, penggiling, dan alat press disediakan oleh pemerintah daerah. Kalau dana kalurahan itu kan terbatas, petani dan desa dapat mengajukan permohonan dana melalui Program Usaha Pembangunan Masyarakat (PUPM) yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, kami juga telah membangun bak penampungan air untuk mengatasi kesulitan pasokan air selama musim kemarau itu kami anggarkan dari Dana Desa. Oleh karena itu, kami membuat bak besar dan jaringan pipa untuk mengalirkan air ke kebun kopi”.(Wawaancara, 19 Februari 2025)

Di sisi lain, pernyataan Pramuji selaku pangripta Kalurahan Kepuharjo menyoroti mekanisme pengajuan proposal bantuan yang melibatkan partisipasi aktif dari petani dan desa itu sendiri. Dengan adanya Program Usaha Pembangunan Masyarakat (PUPM) yang dikelola oleh pemerintah daerah, petani diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan dana demi memenuhi kebutuhan alat-alat penting seperti mesin pengering dan penggiling. Upaya lain yang dilakukan, seperti pembangunan bak penampungan air untuk mengatasi kesulitan pasokan air selama musim kemarau, dengan anggaran Dana Desa 20% Ketahanan Pangan yang *dipush* untuk membuat bak penampungan air. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga berusaha menciptakan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan pertanian kopi. Secara keseluruhan, berbagai dukungan ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian kopi di Kalurahan Kepuharjo.

Selanjutnya, Deny Nur Fitrianto, S.PT. selaku PPL Kalurahan Kepuharjo menyampaikan adanya bantuan perluasan bibit untuk petani kopi sebagai berikut:

“Kepuharjo telah menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perluasan lahan tanaman kopi sebanyak dua kali, yaitu seluas 12 hektar pada tahun 2022 dan 18 hektar pada tahun 2024. Selain itu, juga diberikan bantuan berupa pupuk organik padat”.(Wawancara, 18 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deny Nur Fitrianto, S.PT., selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kalurahan Kepuharjo, dapat diidentifikasi

adanya bentuk intervensi nyata dari pemerintah pusat melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pengembangan komoditas kopi di wilayah Kepuharjo. Intervensi tersebut terealisasi dalam bentuk bantuan perluasan lahan budidaya kopi yang telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2022 seluas 12 hektar dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 18 hektar. Peningkatan luasan ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan program pemerintah dalam sektor pertanian. pemberian pupuk organik padat sebagai bagian dari paket bantuan turut menandakan pendekatan yang berorientasi pada pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bantuan tersebut secara implisit merepresentasikan dukungan struktural yang terarah dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif sekaligus adaptif terhadap dinamika kebutuhan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan

1. Faktor Pendukung

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai faktor yang mendukung fasilitasi pemerintah desa, serta bagaimana interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian kopi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi di wilayah Kalurahan Kepuharjo.

Salah satu faktor yang signifikan dalam proses fasilitasi adalah adanya dukungan bantuan yang komprehensif, yang mencakup penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, serta program pelatihan yang terstruktur. Dengan demikian, dukungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga berperan krusial dalam memperkuat kapasitas petani.

Berikut hasil wawancara dengan Heri Suprpto selaku Lurah Kepuharjo yang menyampaikan:

“Pemerintah desa secara konsisten mendukung kegiatan pertanian melalui berbagai fasilitas yang disediakan. Pada tahun 2023, pemerintah desa telah memberikan sejumlah bantuan, termasuk pupuk, solar, mesin pengering (*dum dryer*), dan mesin pengupas kopi. Bantuan ini disalurkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK Kalurahan) langsung kepada kelompok tani. Namun, tidak semua kelompok tani menerima bantuan tersebut, karena danais dari ngarso dalem itu dibagi berdasarkan kriteria tertentu, sehingga hanya kelompok tani yang menunjukkan kemajuan dalam budidaya kopi yang mendapatkan mesin. Sebagai contoh, tiga kelompok tani berhasil menerima mesin kopi yang dapat digunakan bersama di wilayah Kepuharjo”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Heri Suprpto, Lurah Kepuharjo, mengungkapkan dengan jelas peran aktif pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi melalui berbagai fasilitas yang disediakan. Dalam pernyataannya, Bapak Heri menegaskan bahwa pada tahun 2023, dukungan tersebut terwujud dalam bentuk bantuan yang signifikan, seperti pupuk, solar, mesin pengering, dan mesin pengupas kopi, yang disalurkan langsung kepada kelompok tani melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK Kalurahan). Namun, proses distribusi bantuan ini tidak bersifat merata, hanya kelompok tani yang memenuhi kriteria tertentu, yang

mencerminkan kemajuan dalam budidaya kopi, yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini terlihat dari contoh konkret di mana tiga kelompok tani yang menunjukkan prestasi dalam pengelolaan pertanian kopi berhasil mendapatkan mesin kopi untuk digunakan secara bersama-sama, mencerminkan adanya selektivitas yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor pertanian di wilayah tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, berikut hasil wawancara dengan Tulus Budi Wiratno selaku Carik Kepuharjo untuk mendukung petani dalam pengelolaan pasca panen terutama penjualan hasil panen kopi disampaikan:

“Koperasi Kebun Makmur memiliki pengalaman yang cukup baik, terutama dalam pengelolaan kopi. Keberadaan koperasi ini memberikan keuntungan bagi petani, karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak, serta perhatian yang lebih besar terhadap kualitas produk”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Kemudian, pernyataan Tulus Budi Wiratno, Carik Kepuharjo, menambah perspektif mengenai peran koperasi, yaitu Koperasi Kebun Makmur, yang telah menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan kopi. Koperasi ini dianggap memberikan keuntungan bagi petani, tidak hanya dari segi harga yang lebih tinggi dibandingkan tengkulak, tetapi juga perhatian yang lebih besar terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan daya tawar petani di pasar.

2. Faktor Penghambat

Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari beragam faktor, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi yang relevan,

hingga ketidakcukupan infrastruktur pendukung yang dapat memperlancar proses produksi dan distribusi kopi. Selain itu, kurangnya pemahaman antara pemerintah desa dan petani mengenai pentingnya kolaborasi dalam merumuskan program-program pemberdayaan yang efektif seringkali mengakibatkan terjadinya ketidakselarasan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidakharmonisan ini, pada gilirannya, dapat menghambat pencapaian tujuan bersama, yakni peningkatan kesejahteraan petani kopi, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap inisiatif pemberdayaan yang diusung oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan membangun sinergi antara berbagai pihak terkait, sehingga program-program yang dirancang dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan para petani kopi.

Kesadaran masyarakat yang minim menjadi tantangan dalam upaya pemberdayaan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Heri Suprpto:

“Terkait dengan kopi, tantangannya adalah sulitnya mengarahkan petani untuk mulai menanam kopi. Banyak petani lebih tertarik kepada tambang dan wisata, karena mereka bisa langsung mendapatkan uang. Sementara itu, untuk petani kopi, mereka harus menunggu cukup lama, untuk kopi arabika bisa memakan waktu 3,5 tahun, sedangkan robusta bisa lebih dari 5 tahun. Selain itu, kopi juga rentan terhadap berbagai penyakit, berbeda dengan tanaman cabai”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Berikutnya pernyataan dari Tulus Budi Wiratno:

“Sebagian besar petani memiliki kebun kopi, tetapi setelah erupsi pada tahun 2010, mereka mulai beralih ke sektor wisata, sehingga kebun kopi hanya menjadi usaha sampingan. Intinya, mereka lebih fokus pada wisata menggunakan jeep, dan hanya pergi ke kebun saat hari-hari sepi. Efek dari erupsi juga memengaruhi kesuburan tanah.

Awalnya, tanah itu subur selama 1-5 tahun, tetapi setelah itu, kesuburannya menurun karena kurangnya pemupukan. Kuncinya adalah pemupukan yang tepat; meskipun pupuknya banyak, jika tidak disiram air, tanah tetap bisa subur”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Pernyataan dari Andi Ferdana:

“Kendala yang dihadapi petani adalah sulitnya menemukan orang yang mau menanam kopi lagi, sehingga proses regenerasinya terhambat. Banyak orang berusia di bawah 40 tahun yang tidak tertarik untuk bertani”.(Wawancara, 20 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan. Heri Suprpto mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat yang minim menjadi salah satu kendala utama, di mana petani lebih memilih sektor yang memberikan hasil cepat, seperti tambang dan pariwisata, ketimbang menanam kopi yang memerlukan waktu dan perawatan lebih intensif. Dalam hal ini, ketidakpastian pendapatan dari tanaman kopi, yang membutuhkan waktu hingga 5 tahun untuk robusta dan 3,5 tahun untuk arabika, semakin membuat petani enggan berinvestasi dalam budidaya kopi. Selain itu, Tulus Budi Wiratno menambahkan bahwa meskipun banyak petani memiliki kebun kopi, pergeseran fokus pasca-erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah menyebabkan kebun kopi beralih menjadi usaha sampingan, di mana petani lebih memprioritaskan kegiatan wisata. Hal ini diperparah dengan penurunan kesuburan tanah yang disebabkan oleh minimnya pemupukan, meskipun pemupukan yang tepat dapat mengembalikan kesuburan tersebut. Di sisi lain, Andi Ferdana mencatat

bahwa regenerasi petani kopi terhambat oleh kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian, menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian kopi di wilayah tersebut. Dengan demikian, sinergi antara kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, dan regenerasi generasi muda menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya memajukan kesejahteraan petani kopi.

Selain itu, hambatan dalam fasilitasi berupa sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan petani kopi, seperti kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Berikut hasil wawancara dengan Heri Suprpto selaku Lurah Kepuharjo:

“Saat ini, kopi yang telah banyak ditanam di daerah Batur, Kopeng, dan Jambu, sedangkan Kaliadem masih belum mengalami perkembangan seperti sebelumnya. Kami telah mendirikan bak penampungan air sebagai antisipasi terhadap musim kemarau, mengingat kesulitan akses air di sini. Oleh karena itu, kami membangun bak-bak besar dan jaringan pipa untuk distribusi air. Harapan kami ke depan adalah agar semua daerah dapat terlayani secara merata. Di Kaliadem, saat ini belum ada tanaman yang tumbuh, sebab aliran listrik baru menjangkau Jambu, dan untuk mendistribusikan air, dibutuhkan listrik untuk mendorong aliran air tersebut”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Dalam hasil wawancara dengan Heri Suprpto, Lurah Kepuharjo, terungkap bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam pengembangan pertanian kopi di wilayah Batur, Kopeng, dan Jambu, daerah Kaliadem masih mengalami stagnasi yang cukup mencolok. Hal ini disebabkan oleh minimnya dukungan infrastruktur, terutama dalam hal penyediaan akses air yang memadai, yang mana menjadi krusial bagi pertumbuhan tanaman kopi. Heri menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah

desa telah membangun bak penampungan air dan jaringan pipa untuk distribusi air, sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau yang kerap melanda. Namun, harapan untuk meratakan pelayanan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk Kaliadem, terhambat oleh keterbatasan aliran listrik yang baru menjangkau Jambu, yang mana sangat diperlukan untuk mendukung sistem penyiraman tanaman. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa sarana dan prasarana yang belum memadai, ditambah dengan tantangan teknis seperti ketersediaan listrik, berkontribusi pada lambatnya pengembangan potensi pertanian kopi di daerah tersebut, yang seharusnya dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan yang lebih baik dari pemerintah.

Pasca panen dan akses pasar juga menjadi salah satu faktor penghambat petani kopi enggan menanam kopi kembali. Berikut hasil wawancara dengan Suroto selaku petani kopi:

“Kalau untuk saya pribadi pasca panennya itu mbak yang jadi kendala juga karena pengolahannya kan juga memakan waktu, disini lain nanti untuk penjualan juga kalau belum punya akses pasar sendiri ya susah mbak kalau gak ke koperasi. Kadang juga habis panen raya besar kemudian tahun-tahun depan agak rendah kan gitu siklusnya juga kadang cabangnya udah agak tua tumbuh cabang baru”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Hasil wawancara dengan Suroto, seorang petani kopi di Kalurahan Kepuharjo, mengungkapkan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam proses pasca panen dan akses pasar, yang pada gilirannya memengaruhi niat petani untuk kembali menanam kopi. Suroto menyoroti bahwa pengolahan pasca panen menjadi kendala signifikan, di mana proses ini tidak hanya

memakan waktu, tetapi juga menuntut perhatian ekstra. Selain itu, ia menekankan bahwa tanpa akses pasar yang memadai, penjualan hasil panen menjadi sulit, terutama jika bergantung pada koperasi yang terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Ia juga menunjukkan bahwa siklus produksi kopi yang tidak menentu, di mana setelah panen raya yang melimpah sering kali diikuti oleh tahun-tahun dengan hasil yang menurun, ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah tua dan perlu regenerasi cabang baru, semakin memperburuk situasi.

Berikutnya ada pernyataan dari Pramuji selaku Pangripta Kalurahan Kepuharjo yang menyampaikan:

“Selain itu kadang program dari kementrian terutama dari pusat kadang gak match dari apa yang dibutuhkan dari kelompok yaitu juga kadang menimbulkan konflik juga. Misal dari daerah atas itu mintanya tanaman kopi yang arabica yang memang daya jualnya lebih tinggi dan ketinggiannya sudah cocok kalau di sini kan belum bisa disini itu robusta, nah kadang pemerintah itu ngasihnya kelebihan gaada yang arabica gaada yang robusta jadi kadang mereka gamau terima”.(Wawancara, 19 Februari 2025)

Pernyataan dari Tulus Budi Wiratno selaku carik Kalurahan Kepuharjo:

“Perbedaan pendapat ya ada, misal dari petani itu maunya yang robusta tapi kita maunya arabica karena adanya bibit arabica, lalu untuk kesepakatan kerja bakti juga”.(Wawancara, 10 Februari 2025)

Dalam analisis wawancara dengan narasumber di atas, terungkap adanya tantangan signifikan dalam fasilitasi pemerintah desa yang berkaitan dengan kesejahteraan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo. Pramuji mencatat bahwa sering kali program dari kementerian pusat tidak sejalan

dengan kebutuhan nyata kelompok petani, yang dapat memicu konflik. Misalnya, permintaan dari daerah atas untuk tanaman kopi *arabica*, yang memiliki daya jual lebih tinggi, sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan bibit yang sesuai, sehingga pemerintah justru memberikan bibit *robusta* yang tidak diinginkan oleh petani. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan. Tulus Budi Wiratno menambahkan bahwa perbedaan pendapat di antara petani juga menjadi hambatan, di mana keinginan petani untuk menanam *robusta* bertentangan dengan dorongan untuk beralih ke *arabica*, yang didukung oleh ketersediaan bibit. Situasi ini mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, di mana kesepakatan dalam hal jenis tanaman yang akan ditanam serta dalam pelaksanaan kerja bakti menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan observasi di lapangan terkait dengan fasilitasi dalam menunjang kesejahteraan petani melalui upaya pemberdayaan di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jika ditinjau dari letak geografisnya Kalurahan Kepuharjo terletak di kaki gunung merapi sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan seperti perkebunan, pertambangan, peternakan serta pariwisatanya.

Hasil observasi di lapangan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara melimpahnya potensi alam dengan pemanfaatannya terutama di bidang perkebunan. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama perkebunan kopi. Berdasarkan hasil observasi disebutkan bahwa upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh pemerintah desa, diantaranya dengan fasilitasi yang berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai contoh program yang telah dijalankan yaitu mencari bantuan bibit, mesin pengolah kopi, pupuk dan lain sebagainya. Namun yang menjadi perhatian adalah erupsi gunung merapi 2010, berdasarkan hasil observasi perkebunan terkena dampak akibat letusan tersebut yang mengakibatkan perkebunan hancur. Untuk itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam sejauh mana program pemerintah desa untuk menunjang kesejahteraan petani dengan mendorong petani untuk menghidupkan kembali perkebunan yang sudah hancur untuk maju dan berkembang kembali seperti sebelum erupsi tahun 2010.

Gambar 3. 5 Dusun Petung



Sumber: Data Hasil Observasi

Dapat dilihat bahwa lahan perkebunan di Kalurahan Kepuharjo sangat subur, seperti yang tercermin dalam gambar pertama, yang

menunjukkan hamparan perkebunan hijau. Keberadaan tanah yang subur ini sangat vital bagi para petani kopi, yang sangat bergantung pada kesuburan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, situasi ini mengalami perubahan drastis, sebagaimana terlihat pada gambar kedua, yang menggambarkan kondisi pasca-erupsi Gunung Merapi. Erupsi tersebut telah menghancurkan hampir seluruh perkebunan masyarakat. Akibatnya, para petani tidak hanya kehilangan lahan yang subur, tetapi juga mata pencaharian mereka, yang selama ini mereka andalkan untuk bertani dan berkebun. Kehilangan ini menciptakan tantangan besar tidak hanya bagi mereka, yang kini harus berjuang untuk bangkit dan menemukan cara baru dalam mempertahankan kehidupan di tengah dampak bencana yang menghancurkan, akan tetapi bagi pemerintah desa sendiri untuk menghidupkan kembali desa yang hancur akibat letusan Gunung Merapi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menciptakan Interaksi yang Produktif

Pemerintah Kalurahan Kepuharjo telah berupaya menciptakan interaksi yang produktif dengan petani kopi melalui fasilitasi pembentukan Kelompok Tani dan Gapoktan, serta pelibatan masyarakat dalam forum seperti musyawarah dusun (MusDus) dan Musrenbang. Praktik ini mencerminkan konsep fasilitasi sebagai proses aktif dalam menciptakan ruang partisipatif dan pengambilan keputusan yang inklusif karena setiap aspirasi petani dituangkan dalam ruang tersebut, tidak hanya itu namun fasilitasi berupa dana bantuan juga disampaikan demikian. Dalam perspektif *governing*, tindakan pemerintah ini menunjukkan bentuk Perbuatan Pemerintah yang mengedepankan dialog sosial dan distribusi kewenangan sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif.

2. Memungkinkan Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif petani kopi mulai tumbuh seiring adanya bantuan bibit, pelatihan, dan alat teknologi. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat reaktif, bukan karena keberdayaan struktural. Yang artinya petani terlibat dalam proses yang ada hanya sebagai respons terhadap kebutuhan atau masalah yang muncul. Sementara itu, pemerintah desa lebih banyak

melakukan dorongan secara lisan daripada melalui kebijakan tertulis, yang dalam konteks *governing* justru melemahkan legitimasi peran pemerintah sebagai pengatur dan pengarah pembangunan jangka panjang. Fasilitasi tanpa kerangka kebijakan formal membuat proses partisipatif berjalan tanpa kepastian hukum dan arah yang jelas.

3. Peningkatan kapasitas petani telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pelatihan teknis yang sistematis untuk meningkatkan keterampilan petani, penyuluhan yang berfokus pada praktik pertanian yang berkelanjutan, serta dukungan berupa alat produksi modern yang memadai. Fasilitasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator yang berperan untuk membantu kelompok mencapai tujuannya dengan memfasilitasi diskusi, mengelola proses, dan mendorong partisipasi aktif. Dalam perspektif Mazhab Timoho, tindakan ini mencerminkan prinsip kepercayaan, kompetensi, dan support dalam tata kelola desa. Namun, pelaksanaan program peningkatan kapasitas masih sangat bergantung pada PPL Desa dan instansi luar (Dinas Pertanian), hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum mampu secara SDM (Sumber Daya Manusia) sebagai institusi lokal pembangun kapasitas.
4. Faktor pendukung seperti bantuan alat, bibit, dan pelatihan telah berkontribusi terhadap pemulihan kembali kebun kopi pasca-erupsi. Namun, faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya regenerasi petani muda, keterbatasan infrastruktur, dan ketidakcocokan program pusat dengan kebutuhan lokal menunjukkan

kurangnya sensitivitas dalam fasilitasi yang dilakukan pemerintah desa. Perbedaan pendapat antar pemangku kepentingan dan lambatnya respons terhadap permasalahan struktural membuktikan belum terbangunnya *governing system* yang adaptif.

B. Saran

Berikut ini sebagai saran dan masukan bagi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dengan tujuan sebagai bahan korektif atau masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dibarengi dengan peraturan yang tegas dan sistematis. Pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas dan kualitas forum interaksi agar tidak hanya menjadi sarana administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjang pertanian kopi secara berkelanjutan. Meskipun terdapat struktur formal seperti Gapoktan dan Kelompok Tani, namun masih tergantung pada dominasi lisan, untuk itu Pemerintah Desa perlu membuat dokumen tulisan resmi agar tercipta tata kelola yang kuat.
2. Pemerintah desa perlu segera merumuskan Peraturan Kalurahan (Perkal) khusus tentang pengembangan dan perlindungan petani kopi sebagai bentuk konkret dari perbuatan pemerintah. Kritik terhadap pemerintah desa adalah bahwa upaya fasilitasi selama ini terlalu bergantung pada bantuan dari luar, tanpa menunjukkan upaya mendalam untuk membentuk kerangka kelembagaan lokal yang kuat. Ini menunjukkan lemahnya posisi *governing*

actor dalam mengambil peran strategis sebagai pembuat arah, bukan sekadar pelaksana bantuan.

3. Pemerintah Desa perlu membangun unit pelatihan internal berbasis lokal, atau setidaknya mengalokasikan anggaran tetap untuk peningkatan kapasitas petani. Kritik yang perlu diajukan adalah minimnya investasi anggaran dan SDM (Sumber Daya Manusia), yang menyebabkan program pelatihan tidak terstruktur, tidak berkelanjutan, dan terlalu bergantung pada agenda pihak eksternal. Dalam kerangka *governing*, pemerintah belum sepenuhnya mengambil tanggung jawab institusional dalam melaksanakan kewenangannya dalam meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, & Wildan. (2018). Fasilitas Pembinaan Pemasaran Produk Ukm Pada Dinas
- Ahoinnai, P. N., & dkk. (2024). Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Oabikase dan Desa Kiusili di Tinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
- Ahamd, F. F., & Nihayatul, S. (Vol. 2 No. 1 Tahun 2024). Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Bantuan Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Sampang. 261-270.
- Desa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.2*, 62-75.
- Akbar, A. R., Noer, S., & Hudalloh. (2023). Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator Dalam Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No.1*, 43-53.
- Apipuddin, & dkk. (2024). Optimalisasi Pembibitan Tanaman Cabai Sebagai Sumber Pendapatan Baru Bagi Masyarakat Desa Setungkep Lingsar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 3 No. 2*, 1-12.
- Asiyah, S., & Dkk. (2023). Peran Penyuluh Dalam Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi Di Desa Benteng Alla Kecamatan Baroko Kaabupaten Enrekang. 1-9.
- Diwangga, D. G. (2021). Pengembangan Potensi Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cintaratu Parigi Kabupaten Pangandaran. 807-820.
- Herman, & dkk. (2024). Analisis Pemberian Punishment Pada Karyawan CV. XYZ. *Journal of Educational and Language Research Vol.3, No.8*, 423-432.
- Hidayati. (2021). Peran Fasilitas dalam Meningkatkan Komunikasi Kelompok. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 8(2)*, 123-130.
- Iriani, D. M. (2023). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. 72-88.

- Kasmita, K. H., & dkk. (2021). Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian Di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. *Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, Volume 6, Nomor 2, November 2021, 149-170.
- Malasari, W., & dkk. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Dalam Upaya Meningkatkan Kuantitas Komoditas Kopi Gunung Kelir. 123-130.
- Nippi, A. T., & M, A. P. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja Journal Vol. 2, No. 1*, 35-47.
- Nurhanifa, F. K., & Ansori. (2024). Peranan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur . *Jurnal comm-edu Volume 7 Nomor 1*, 48-59.
- Nurhidayat, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Volume 1 Nomor 1*, 10-29.
- Pintakam, L. B., & Putri, R. (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani Kopi Arabica Lestari Di Kabupaten Blitar . *PROSPEK: Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 25-40.
- Pratama, L., & dkk. (2023). Analisis Bibliometrik: Kajian “Fasilitasi” dalam Isu Pemberdayaan . *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume 11 Issue 1*, 30-39.
- Romdona, S., & dkk. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner. *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 3, No. 1*, 39-47.
- Sinaga, A., & dkk. (2024). Analisis Kegiatan Pemberdayaan Petani Kopi dalam Peningkatan Hasil Produksi Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. *Journal of Social Science and Digital Marketing Vol.IV, No.1*, 27-37.
- Sriyono, E., & Asri, D. P. (2022). Sistem Irigasi Tetes dan Indikasi Geografis Sebagai Upaya Penguatan Potensi Lokal Kopi Robusta Merapi Sleman di Yogyakarta. 124-131.

- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa . *Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1*, 82-95.
- Sukoco, J. B., & Warsono, H. (2024). fasilitasi pemberdayaan masyarakat. *Modul Project Based Learning*, 2-68.
- Sutoro, E. Y. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governabilitas: Volume 2 Nomor 1*, 1-19.
- Tarigan, I. B., Sembiring, W. M., & Angelia, N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Potensi Pertanian Desa Di Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1) , 43-51.
- Triana, Y. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11 Nomor 2,,* 512-522.
- Usman, M. I., & dkk. (2023). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Konsep Usaha Tani Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol. 12 No 1*, 14-27.
- Utami, R. A., & Novikarumsari, N. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombongsari, Kabupaten Banyuwangi . *Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Vol. 3(1)*, 61-74.
- Wahyudi, E., & dkk. (2018). Perkembangan Perkebunan Kopi Di Indonesia. *Jurnal Masepi Vol.3, No.1,,*
- Yulianti, D., & dkk. (2024). Strategi Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia di Lombok: Proses Adaptasi Pasca Kepulangan ke Wilayah Asal . *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 337-348 .



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 112/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Utami Sulistiana, S.P., M.P

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Ainna Paradiva G
No. Mahasiswa	:	21520082
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Oktober 2024

Ketua Program Studi


Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA IV, A STATUS TERAKREDITASI
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 54/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ainna Paradiva Gandasari
Nomor Mahasiswa : 21520082
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan,
Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Menunjang
Kesejahteraan Petani Kopi di Kalurahan Kepuharjo,
Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



Yogyakarta, 5 Februari 2025

Ketua

[Signature]
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMBAHASAAN, PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN, PROGRAM STUDI TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 106/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Di tempat.

Dengan hormat,

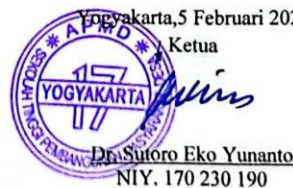
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Ainna Paradiva Gandasari
No Mhs : 21520082
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Menunjang Kesejahteraan Petani Kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAKSARAJI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAKSARAJI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAKSARAJI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAKSARAJI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 501071, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 54/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Ainna Paradiva Gandasari
Nomor Mahasiswa : 21520082
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan,
Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Menunjang
Kesejahteraan Petani Kopi di Kalurahan Kepuharjo,
Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 5 Februari 2025

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



TULUS BUDI WIRATNO
NIP. 198807092009081002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEPUHARJO
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦲꦂꦺ
Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, 55583
Telepon 085641766900 email : Desakepuharjo03@gmail.com

Nomor : 070 / 01 / VI / 2025

Perihal : Keterangan Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI SUPRAPTO

Jabatan : Lurah Kepuharjo

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Ainna Paradiva Gandasari

NIM : 21520082

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD "

Yogyakarta.

Telah mengadakan Penelitian di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman dengan judul : " Fasilitas Pemerintah Desa dalam Menunjang Kesejahteraan Petani Kopi di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepuharjo, 05 - 06 - 2025

Lurah Kepuharjo



HERI SUPRAPTO

LAMPIRAN

No	Gambar	Keterangan
1.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Tulus Budi Wiratno selaku Carik Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 10 Februari 2025
2.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Mugiyanto selaku petani kopi di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 10 Februari 2025
3.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Suroto selaku petani kopi di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 10 Februari 2025
4.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Deny Nur Fitriyanto selaku PPL Desa di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 18 Februari 2025

5.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Heri Suprpto selaku Lurah di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 19 Februari 2025
6.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Pramuji selaku Pangripta di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 19 Februari 2025
7.		Foto ketika wawancara bersama Bapak Andi Ferdana selaku Ulu-ulu (Kasi Kesejahteraan) di Kalurahan Kepuharjo. Wawancara, 20 Februari 2025

Interview Guide (Panduan Wawancara)

**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KALURAHAN KEPUHARJO,
KAPANEWON CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN**

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

A. Ditujukan Kepada Pemerintah Desa Kepuharjo

1. Apa saja kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah desa untuk mendukung kesejahteraan petani kopi?
2. Bagaimana bentuk kewenangan yang diberikan kepada petani kopi pada proses pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan atau program untuk petani kopi?
3. Apakah ada program atau fasilitasi yang bertujuan meningkatkan etos kerja petani kopi? Selain fasilitasi berupa teknologi yang sudah disediakan untuk mendukung kegiatan petani kopi?
4. Apakah pemerintah desa menyelenggarakan pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan petani kopi? Program atau pelatihan apa saja yang telah dilakukan?
5. Bagaimana cara pemerintah desa mengevaluasi kebutuhan pelatihan bagi petani kopi? Mungkin dengan memfasilitasi penggunaan teknologi atau metode pertanian baru untuk petani kopi?
6. Bagaimana cara pemerintah desa membangun kepercayaan dengan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo? Misal komunikasi yang terjalin itu

bagaimana, serta meyakinkan petani bahwa mereka itu punya potensi untuk mengembangkan pertanian kopi.

7. Bagaimana pemerintah desa memastikan transparansi dalam setiap kebijakan atau program untuk petani kopi?
8. Apa langkah yang diambil jika ada permasalahan yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan petani terhadap pemerintah desa?
9. Apakah pemerintah desa memiliki program untuk membuka akses pasar bagi petani kopi?
10. Apakah pemerintah desa memberikan ruang atau kesempatan adanya forum atau pertemuan rutin untuk berdiskusi dan mendengar masukan dari petani kopi? Atau keluhan terkait dengan program yang ada.
11. Apa saja tanggung jawab utama pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan petani kopi di Kalurahan Kepuharjo?
12. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa program-program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan petani kopi?
13. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada petani kopi di Kalurahan Kepuharjo? Seperti pupuk, bibit, atau teknologi yang diberikan kepada petani kopi?
14. Apakah pemerintah desa menyediakan bantuan finansial atau anggaran melalui dana desa untuk mendukung petani kopi?

B. Ditujukan Kepada Petani Kopi

1. Apakah Anda mengetahui atau pernah mengikuti program pemberdayaan petani kopi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa?
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai bantuan atau program yang diberikan pemerintah desa? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan petani?
3. Apakah Anda merasa dilibatkan atau diberi ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan pertanian kopi?
4. Apakah ada forum atau diskusi di mana petani dapat menyampaikan aspirasi dan ide-ide terkait pemberdayaan?

5. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah desa?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang pelatihan atau penyuluhan tersebut? Apakah membantu meningkatkan keterampilan bertani Anda?
7. Apakah Anda merasa percaya terhadap kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mendukung petani kopi? Bagaimana pendapat Anda tentang komunikasi antara petani dan pemerintah desa?
8. Apakah ada kerja sama antara petani kopi dengan pihak luar (koperasi, pengusaha, atau lembaga lainnya) yang difasilitasi oleh pemerintah desa?
9. Menurut Anda, apa tanggung jawab utama pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan petani kopi? Apakah Anda merasa pemerintah desa sudah menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik?
10. Apakah dukungan dalam bentuk material (seperti pupuk atau bibit) sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan Anda?

C. Ditujukan Kepada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Desa

1. Bagaimana PPL mendukung kebijakan pemerintah desa terkait petani kopi? Terutama di kalurahan kepuharjo sendiri.
2. Apakah PPL memfasilitasi pengenalan teknologi baru atau praktik pertanian yang lebih baik?
3. Bagaimana keterlibatan PPL dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada petani kopi?
4. Bagaimana PPL membantu membangun komunikasi antara petani kopi dan pemerintah desa?
5. Apakah ada komunikasi yang rutin dan terbuka antara PPL dan petani kopi untuk mendiskusikan program pemberdayaan?
6. Apakah PPL memberikan informasi atau pelatihan tentang peluang kerja sama dengan pihak luar? Serta memfasilitasi kerja sama antara petani dan pihak ketiga untuk pengembangan usaha kopi?

7. Bagaimana PPL membantu memastikan bahwa kebutuhan petani kopi terpenuhi melalui program-program yang ada? Serta bagaimana evaluasi atau pemantauan program-program yang dijalankan?
8. Apa saran Anda untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan petani kopi?
9. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh PPL kepada petani kopi di Kalurahan Kepuharjo? Misal pendampingan atau kunjungan rutin ke lahan petani kopi untuk memberikan dukungan teknis?
10. Apa upaya yang dilakukan PPL untuk meningkatkan efektivitas dukungan yang diberikan kepada petani kopi?